UPAYA *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* (TAN's) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE TAHUN 2020-2021

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh:

FUAD MUHAMAD FAHRUDIN

17323130

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

UPAYA *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* (TAN's) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE TAHUN 2020-2021

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

FUAD MUHAMAD FAHRUDIN

17323130

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* (TAN's) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE TAHUN 2020-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

_____

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial BudayaUniversitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A)

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.Int.Rel.	
2	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
3	Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritasakademik.

25 Desember 2022,



Fuad Muhamad Fahrudin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bapak H. Dede Jalaludin & Ibu HJ. Nunuy Nurhayati

Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, harapan, pemahaman, kesabaran, dan nasihat yang selalu kalian berikan

Keluarga Besar Bani Jalaludin

Terima kasih atas doa serta dukungan yang kalian berikan

Sahabat-Sahabat PMII Wahid Hasyim UII

Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan pembelajaran selama berproses di organisasi

Rekan – rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama perkuliahan di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

HALAMAN MOTTO

"*Setiap Manusia Adalah Hasil Jerih Payahnya, Semakin Keras*

Berusahan Semakin Pantas Ia Jaya"

(KH. A. Wahid Hasyim)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanallahuwa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan meteril. Tak terhitung pengalaman serta ilmu yang penulis dapatkan selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ditengah jenuhnya situasi pandemi.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.Int.Rel. selaku Dosen

Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang bapak berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian bapak. Selama berlangsungnya bimbingan, saya selalu merasa bangga dan juga selalu mendapatkan ilmu baru. Terimakasih atas segala ilmu dan saran yang bapak sampaikan sehingga membuat diri ini merasa semakin percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Semoga kebaikan bapaki dibalas oleh Allah SWT.

6. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

   Terimakasih atas bimbingan, dampingan, dan saran yang telah diberikan selama studi saya di HI UII. Tidak pernah sekalipun saya merasa tersesat dikarenakan ibu senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kami. Saya begitu senang melakukan interaksi dengan ibu disaat ada hal yang perlu saya tanyakan atau diskusikan sehingga tidak sekalipun saya berada pada posisi yang membingungkan. Terimakasih banyak Bu, semoga ibu selalu bertemu dengan orang-orang baik dan kebaikan ibu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

   Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Berkat pengorbanan, ketulusan, kebaikan, dan ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan, kami bisa menjadi

pribadi yang lebih baik dan berguna.Tak lupa juga saya ucapkan kepada Mbak Mardiatul Hasanah selaku staff prodi HI UII yang selalu membantu kami dengan kesabaran, baik dalam urusan-urusan akademik dan juga membantu dalam masalah penyelesaian skripsi ini. Semoga program studi HI UII akan selalu sukses dan membanggakan dari segi kualitas pendidikan yang diberikan.

7. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan saya dukungan, kasih sayang, dan juga memahami apa saja yang saya harapkan. Terima kasih karena selalu menjadi orang tua yang paling saya banggakan dan menjadi teman diskusi dalam segala hal. Tanpa dukungan kalian, perjalanan sayadi masa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir akan terasa lebih berat dan penuh rintangan.
8. Kepada keluarga besar bani Jalaludin, terima kasih karena selalu mendukung saya setiap saat.
9. Kepada keluarga besar PMII Wahid Hasyim UII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungan, kebersamaan, dan didikan senior-senior selama berproses di organisasi
10. Kepada teman-teman di HI UII Angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena menjadi teman baik saya selama berkuliah di HI UII.

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **6**
1.3 Tujuan Penelitian **6**
1.4 Cakupan Penelitian **6**
1.5 Tinjauan Pustaka **7**
1.6 Kerangka Pemikiran **12**
1.7 Argumen Sementara **16**
1.8 Metode Penelitian **17**
1.8.1 Jenis Penelitian 17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 18
1.8.4 Proses Penelitian 18
1.9 Sistematika Pembahasan **19**
BAB 1 Pendahuluan 19
BAB 2 Konteks Dari Penelitian 19
BAB 4 Kesimpulan dan Rekomendasi 20
BAB 2 ..... **21**
KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* PRESIDEN DUTERTE DAN JARINGAN *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* (TAN'S) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI FILIPINA **21**
2.1. Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte **21**

2.1.1 Projek *Double Barrel* Sebagai Implementasi Kebijakan *War On Drugs* President Duterte 23
2.1.2. Pelanggaran HAM Dalam Pelaksanaan Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte 29
2.2. Jaringan *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) Dalam Menangani Permasalahan HAM di Filipina 34
BAB 3 46
UPAYA TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM DI FILIPINA 46
3.1. *Information Politics* 48
3.2. *Symbolic Politics* 54
3.3. *Leverage Politics* 55
3.4. *Accountability Politics* 60
3.5. Tingkat Keberhasilan jaringan TAN Dalam Menangani Permasalahan HAM di Filipina 61
BAB 4 63
PENUTUP 63
Kesimpulan 63
Rekomendasi 65
DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Strategi Laverage Politics Investigate PH..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Boomerang Pattern Dalam Permasalahan HAM di Filipina.... 47
Gambar 3.2. Laman Website Investigate PH 50
Gambar 3.3. Laman twitter Investigate PH..... 52

ABSTRAK

Pada tahun 2016 Presiden Rodrigo Duterte telah resmi menjadi presiden Filipina setelah menang dalam pemilu Presiden di negara tersebut. Pada awal pemerintahannya Presiden Duterte membuat kebijakan *War on Drugs* untuk menangani permasalahan narkoba di Filipina. Namun kebijakan tersebut menuai kecaman karena implementasi dari kebijakan *War on Drugs* telah melanggar HAM. Atas dasar kebijakan tersebut banyak masyarakat Filipina ditembak mati oleh aparat yang sedang melakukan operasi *War on Drugs* tanpa melalui proses pengadilan. Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah juga dikecam oleh NGO lokal yang peduli terhadap HAM di Filipina. Tetapi NGO tersebut mendapat tekanan dari pemerintah karena dianggap mengahalangi operasi *War on Drugs*. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya jaringan *Transnational Advocacy Network* (TAN's) dalam menangani permasalahan HAM di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN's) yang digagas oleh Keck dan Sikkink. Menurut Keck dan Sikkink jaringan advokasi internasional secara signifikan berperan dalam membangun hubungan antar aktor dalam negara, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. *Boomerang Pattern* merupakan ciri khas dari jaringan advokasi transnasional karena tujuan dari pembentukannya yaitu untuk merubah dan mempengaruhi perilaku negara. Agar mendapat kekuatan yang lebih besar, NGO lokal meminta bantuan lembaga internasional yaitu Dewan HAM PBB untuk membuat lembaga investigasi independent yang dapat membantu menangani permasalahan HAM di Filipina. Atas dasar permintaan tersebut, terbentuklah Investigate PH sebagai lembaga independen yang melakukan investigasi terhadap permasalahan HAM di Filipina. Laporan hasil investigasi tersebut diberikan kepada lembaga internasional seperti ICC agar ICC meminta pertanggungjawaban kepada pelaku pelanggaran HAM di Filipina menggunakan mekanisme internasional. Hasil penelitian ini upaya jaringan *Transnational Advocacy Network* (TAN's) belum sepenuhnya berhasil karena pemerintah Filipina tidak mau diintervensi oleh pihak manapun.

Kata Kunci: *War on Drugs,* HAM, *Transnational Advocacy Network* (TAN's)

In 2016 President Rodrigo Duterte has officially become president of the Philippines after winning the presidential election in that country. At the beginning of his administration, President Duterte created a War on Drugs policy to deal with the drug problem in the Philippines. However, this policy drew criticism because the implementation of the War on Drugs policy had violated human rights. On the basis of this policy, many Filipinos were shot dead by security forces who were carrying out War on Drugs operations without going through a court process. Human rights violations committed by the government were also criticized by local NGOs concerned with human rights in the Philippines. However, the NGO is under pressure from the government because it is considered to be obstructing the War on Drugs operation. This research describes the efforts of the Transnational Advocacy Network (TAN's) in dealing with human rights issues in the Philippines during the reign of Rodrigo Duterte using the theory of the Transnational Advocacy Network

(TAN's) initiated by Keck and Sikkink. According to Keck and Sikkink, international advocacy networks play a significant role in building relationships between state actors, civil society, and international organizations. The Boomerang Pattern is a characteristic of transnational advocacy networks because the purpose of its formation is to change and influence state behavior. In order to gain greater power, local NGOs asked for help from international institutions, namely the UN Human Rights Council to create an independent investigative body that could help deal with human rights issues in the Philippines. Based on this request, Investigate PH was formed as an independent institution that investigates human rights issues in the Philippines. The report on the results of the investigation is given to international institutions such as the ICC so that the ICC can hold accountable the perpetrators of human rights violations in the Philippines using international mechanisms. The results of this research are that the efforts of the Transnational Advocacy Network (TAN's) have not been fully successful because the Philippine government does not want to be intervened by any party.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan keamanan internasional saat ini tidak hanya didominasi oleh isu-isu tradisional seperti perang dan konflik perbatasan antar negara, tetapi juga isu-isu keamanan terkait kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime* (EOC), salah satunya adalah narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya akan melukai mental dan produktivitas pecandu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara (Amaritasari, 2017).

Filipina merupakan negara di Asia Tenggara dengan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang cukup tinggi. Menurut data statistik *Dangerous Drugs Board* lebih dari 1 juta dari 109.800.000 orang Filipina adalah pengguna narkoba (Dangerous Drugs Board, 2020). Jenis narkoba yang paling populer digunakan oleh penggunanya yaitu metamfetamin dan ganja, serta beberapa jenis penggunaan skala kecil lainnya. Sabu dan ganja termasuk dalam daftar obat-obatan terlarang yang menjadi ancaman besar bagi otoritas pemerintah Filipina (Nn, The Philippine Drug Situation, 2013).

Laporan *United Nations World Report of Drug* tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan Filipina sebagai produsen ganja dan sabu terbesar kelima di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania. Filipina sering digunakan oleh sindikat narkoba internasional sebagai pusat transit untuk perdagangan narkoba ilegal yang nantinya akan dikirim ke berbagai negara tujuan seperti Guam, Hawaii, dan ke daratan AS. Para pekerja Filipina di luar negeri dijadikan alat untuk

menyelundupkan metamfetamin, kokain, dan heroin. Alasan Filipina dapat dengan mudah mengekspor metamfetamin ke negara lain dipengaruhi oleh faktor geografis. Faktor geografis ini menunjukkan bahwa Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau dan garis pantai sepanjang 36.200 km. Banyak pantai Filipina jarang berpenghuni dan tidak dijaga. Hal ini jelas menyulitkan pihak keamanan nasional Filipina untuk memantau peredaran narkoba di negaranya (United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law, 2010).

Laporan dari *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) menyatakan bahwa Perdagangan narkoba ilegal terus menjadi ancaman nasional yang serius di Filipina, hal itu bisa dilihat dari *narco-politic* selalu menjadi isu utama dalam kampanye politik, terutama dalam pemilihan nasional Filipina. Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa perdagangan narkoba dapat mempengaruhi hasil pemilu di Filipina. Hal tersebut dikarenakan banyak politisi Filipina yang terlibat dalam dunia narkoba. *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) pada tahun 2010 memperkirakan perdagangan obat-obatan terlarang di Filipina mencapai lebih dari $6 hingga $8 miliar per tahun (United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law, 2010, hal. 514).

Sebelum diangkatnya presiden Rodrigo Duterte, kasus narkoba di Filipina selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 – 2015 Filipina mengalami peningkatan kriminalitas seperti kasus kekerasan, pemerasan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Tetapi, 50% dari kasus-kasus tersebut merupakan kasus

yang berhubungan dengan narkoba (R.C.Marquez, 2015). Pemerintah melakukan upaya serius dalam menangani kriminalitas terutama pada kasus narkoba. Namun, upaya yang sudah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi permasalahan narkoba di Filipina (Arugay, 2016).

Pada tahun 2016 Presiden Rodrigo Duterte telah resmi menjadi presiden Filipina setelah menang dalam pemilu Presiden di negara tersebut. Pada awal pemerintahannya, masyarakat Filipina dikejutkan oleh kebijakan yang dibuat oleh Presiden Duterte yang akan membunuh para pengedar narkoba. Presiden Duterte mengambil kebijakan tersebut dikarenakan banyak masyarakat Filipina merupakan pecandu narkoba dan pemerintahan sebelumnya belum bisa mengatasi permasalahan narkoba dengan tuntas. Duterte secara tegas berkampanye akan membunuh para pengedar narkoba dan melakukan perang terhadap pelakunya. Presiden Duterte memberlakukan kembali hukuman mati sebagai bagian dari kebijakannya yang sebelumnya sudah dihapuskan oleh pemerintah Filipina pada tahun 2006. Dalam penanganan kasus narkoba di Filipina, Duterte membuat kebijakan "*War on Drugs*" untuk memerangi para pengedar narkoba. Presiden Duterte menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan "*War on Drugs*" yaitu untuk memberantas kejahatan narkoba dan menghilangkan *narco-politics* di Filipina. Presiden Duterte memerintahkan aparat kepolisi nasional untuk memerangi setiap pengedar dan pelaku yang berhubungan dengan narkoba, jika pelaku kejahatan melawan aparat berhak menembak mati secara langsung pelaku. Selain menugaskan aparat kepolisian nasional, presiden Duterte menugaskan pembunuh bayaran untuk membantu dalam merealisasikan kebijakannya (Herdiansyah, 2019).

Kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan oleh Dutertes menewaskan ribuan orang, dari data resmi pemerintah Filipina pada awal diterapkan kebijakan sampai tahun 2018 korban tewas lebih dari 5000 orang (ALJIBE, 2018). Oleh karena itu, kebijakan *War on Drugs* mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, baik dari nasional maupun internasional. Atas dasar kebijakan ini banyak para pengedar narkoba ditembak mati di tempat dan tanpa diadili terlebih dahulu (Reyes, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari cara aparat pemerintah Filipina melakukan penembakan di luar hukum kepada pelaku-pelaku yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan narkoba. Masyarakat Filipina menilai dalam menangani kasus seharusnya diproses di pengadilan terlebih dahulu. Dunia internasional seperti Amerika Serikat menganggap kebijakan yang dibuat oleh Duterte bertentangan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak hidup dan diadili. Dari definisi *Universal Declaration of Human Right* PBB 1984, bahwa setiap manusia memiliki asas praduga tak bersalah dimana seharusnya para pelaku harus diadili terlebih dahulu oleh penegak hukum Filipina sebelum dijatuhi hukuman mati (Ekoputro, 1985). Meskipun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, Presiden Duterte tetap konsisten menjalankan kebijakan *War on Drugs* nya karena hal tersebut dianggap untuk menjaga keamanan nasional negara Filipina.

Pemerintah Filipina melakukan pembatasan komunikasi terhadap organisasi lokal Filipina yang melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Presiden Duterte memperbolehkan aparat kepolisian nasional Filipina untuk menembak orang-orang yang terlibat dalam aktivisme melawan kebijakan *War on Drugs*. Hal tersebut berdampak terhadap

aktivis HAM Filipina, mereka sering mendapatkan kekerasan, intimidasi, pelecehan, bahkan ditembak mati oleh aparat ketika memperjuangkan HAM.

Oganisasi-organisasi masyarakat sipil Filipina pada sesi ke 45 Dewan HAM PBB menyampaikan tuntutan kepada Dewan HAM PBB untuk menjalankan mandatnya dan segera menciptakan mekanisme investigasi yang independen dan tidak memihak atas maraknya pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran HAM di Filipina. Mereka membutuhkan penyelidikan independen atas pelanggaran HAM di Filipina. Menurut mereka tindakan Dewan HAM PBB dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencegah pelanggaran HAM lebih lanjut di Filipina (act.350.org, 2020).

Investigate PH muncul sebagai komisi independen untuk melakukan investigasi atas pelanggaran HAM di Filipina menggunakan resolusi UNHRC terkait laporan yang dirilis OHCHR pada Juni 2020 tentang situasi HAM di Filipina. Pembentukan Investigate PH bertujuan untuk memperdalam dan memperbarui Laporan OHCHR pada Juni 2020 tentang situasi HAM di Filipina yang memberikan fasilitasi terkait mekanisme akuntabilitas internasional. Kemunculan Investigate PH terinspirasi dari misi solidaritas internasional dan pencarian fakta selama bertahun-tahun di Filipina sejak negara tersebut mengalami darurat militer, yang kemudian temuannya dipresentasikan dan membuat rekomendasi berbasis bukti kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar ditindaklanjuti. (Navallo, 17). Oleh karena itu, dalam penelitian ini

penulis menganalisis bagaimana upaya Investigate PH Dalam Mengatasi Permasalahan HAM di Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah di bawah ini adalah Bagaimana Upaya *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) Dalam Menangani Permasalahan HAM di Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan hak asasi manusia di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte.

2. Untuk mengetahui upaya *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) dalam menangani permasalahan HAM di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte.

3. Untuk mengetahui strategi *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) terhadap permasalahan HAM di Filipina.

1.4 Cakupan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis bahas, maka penelitian ini membahas mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Filipina akibat dari diberlakukannya kebijakan *war on drugs* Presiden Duterte. Setelah

diberlakukannya kebijakan *war on drugs* pada tahun 2016, banyak masyarakat Filipina yang memiliki keterkaitan dengan narkoba meninggal akibat dibunuh oleh tim operasi tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Hal tersebut tentu telah bertentangan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak hidup dan diadili.

Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas terkait peran organisasi lokal Filipina dalam menangani permsalahan HAM di Filipina. Meskipun mereka sering mendapat tekanan dari pemerintah FIlipina, organisasi-organisasi tersebut terus berupaya dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Filipina dengan cara mencari bantuan aktor internasional seperti PBB. NGO lokal Filipina menuntut PBB untuk membuat lembaga investigasi independent yang ikut andil dalam menangani permsalahan HAM di Filipina. Tuntutan tersebut telah menghasilkan lembaga investogasi independent dengan nama Investigate PH. Kemudian, penulis akan membahas bagaimana upaya-upaya Investigate PH dalam mengatasi pelanggaran HAM di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo. Selain itu, penelitian diambil dalam kurun waktu 2020-2021 dikarenakan jaringan TAN mulai muncul pada 2020 dan berakhir pada tahun 2021 setelah ICC secara resmi membuka penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Filipina.

1.5 Tinjauan Pustaka

Topik mengenai peran *Transnational Civil Society* dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebabkan oleh kebijakan *War On Drugs*

Presiden Duterte telah dibahas dalam beberapa karya ilmiah. Hasil dari penelusuran penulis, menemukan bahwa terdapat deskripsi yang memiliki tingkat kesamaan dalam konteks peran *Transnational Civil Society* dalam menangani kasus hak asasi manusia. Karya ilmiah pertama yang di review penulis merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh oleh Stanati Netipatalachoochote, Aurelia Colombi Ciacchi, Ronald Holzhacker tahun 2018, membahas peran *Civil Society Organizations* (CSOs) dalam mengatasi permasalahan *Extrajudicial Killings* di Filipina.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah memainkan peran yang semakin vokal dalam perjuangan mereka untuk memajukan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di negara-negara Asia Tenggara. Secara khusus, OMS menjadi aktor yang lebih penting dalam menangani isu-isu HAM terutama karena perannya dalam menarik perhatian terhadap pelanggaran HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM besar-besaran yang terjadi di Asia Tenggara, OMS mengambil berbagai strategi untuk mengatasi dan mencoba mengakhiri pelanggaran tersebut. Menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara anggota kepada mitra regional, dan kemudian mencari sekutu baru seperti organisasi internasional untuk menekan negara-negara yang melanggar HAM lagi, dalam apa yang digambarkan sebagai model bumerang dinamis, salah satu strategi utama yang digunakan oleh OMS untuk mengurangi pelanggaran HAM. Strategi lain yang baru-baru ini diamati melibatkan OMS yang menghubungi lembaga peradilan yang kuat yang keputusannya dapat mengikat secara hukum di negara yang

melakukan pelanggaran. Makalah ini menerapkan teori model bumerang pada upaya OMS, terutama yang berkaitan dengan kerja mereka dalam membantu mengakhiri pembunuhan di luar hukum pengedar narkoba di Filipina pada masa Presiden Duterte, untuk menunjukkan bagaimana dinamika model bumerang bekerja dan apa yang telah dicapai oleh strategi ini. dalam hal mengakhiri pembunuhan di luar proses hukum. Di luar model bumerang, tulisan ini lebih jauh menunjukkan strategi CSO dalam mendekati badan peradilan yang kuat, dalam hal ini International Criminal Court (ICC). Makalah ini mengkaji mengapa OMS mengejar strategi untuk menghubungi ICC, melewati lembaga hak asasi manusia di kawasan itu yaitu *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) (Stanati Netipatalachoochote, 2018).

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Chusnul Retnowati dengan judul "Human Rights Watch (HRW) Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kebijakan War On Drugs President Rodrigo Duterte Di Filipina". pada karya ilmiahnya penulis membahas bagaimana organisasi internasional yang bergerak pada bidang kemanusiaan yaitu HRW dalam menegakkan HAM pada kebijakan *War on Drugs* Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Pada kebijakan *War on Drugs* diketahui banyaknya korban terbunuh pada saat implementasi kebijakan tersebut melalui operasi polisi. Implementasi kebijakan *War on Drugs* yang menyebabkan ribuan tersangka dan pelaku narkoba terbunuh tidak semua didasarkan pada proses hukum yang berlaku. Operasi polisi terkait narkotika diketahui nampak sistematis, terencana dan terorganisir oleh otoritas yang mengindikasikan adanya kejahatan atas kemanusiaan (RETNOWATI, 2018).

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Laila Rezvina Baswedan dengan judul "Kebijakan *War on Drug* Presiden Rodrigo Duterte di Tengah Tekanan Aktor Internasional" yang membahas alasan Presiden Rodrigo Duterte terus melakukan kebijakan *War on Drugs*-nya meskipun mendapat kritik dan kecaman dari aktor internasional. Datangnya kritik dari aktor internasional disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte dianggap melanggar HAM. Tetapi kecaman tersebut dihiraukan oleh Duterte karena dianggap mengganggu kedaulatan negara, padahal kebijakan yang dikeluarkan oleh Duterte merupakan bagian dari upaya Duterte untuk menangani permasalahan narkoba di Filipina yang pada awalnya susah untuk ditangani (Baswedan, 2017).

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul "*Duterte and His Quixotic War on Drugs*" yang ditulis oleh Lowell B. Bautista pada tahun 2017 dari University of Wollongong. Dalam karya ilmiahnya penulis menjelaskan biografi Presiden Duterte. Selain itu, penulis menjelaskan bahwa kebijakan Duterte dalam menjalankan kebijakannya dianggap main hakim sendiri karena banyak orang-orang yang dihukum mati tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Duterte menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan sebagai upaya untuk memberantas narkoba yang dapat mengancam keamanan negara Filipina (Bautista, 2017).

Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang negara yang memiliki monopoli kekuasaan, melalui dukungan, pengarahan, dan pengesahan pejabat

tertinggi negeri itu dapat membunuh ribuan orang. Ini bukan hanya masalah legalitas tetapi juga salah satu legitimasi, karena ketika aparatur negara digunakan untuk membunuh warga Filipina tanpa proses hukum yang semestinya. Pemerintah Filipina menggunakan monopoli kekuasaannya dalam menyelesaikan persoalan narkoba. Lowell mengatakan bahwa cara untuk menghentikannya monopoli kekuasaan Duterte, publik harus mengecam kebijakannya dan melakukan seruan untuk menghentikan kebijakan *War On Drugs* di Filipina (Bautista, 2017).

Selanjutnya, yang menjadi acuan penulis adalah jurnal *The Early Duterte Presidency in The Philippines* yang ditulis oleh Mark R. Thompson pada tahun 2016 dari *Journal of Current Southeast Asian Affairs* yang menjelaskan tentang bagaimana kemenangan Duterte dalam pemilu 2016 dengan mengkampanyekan perang melawan narkoba. Selain itu penulis juga menjelaskan sifat pemerintahan Presiden Duterte (Thompson, 2016). Dalam tulisannya penulis menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan dalam kemenangannya dalam pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 (mengingat kelemahan dari kandidat utama lainnya). Menurut penulis pesan-pesan kampanye yang disampaikan oleh Duterte menjadi harapan bagi rakyat Filipina untuk menangani berbagai ancaman kriminalitas terutama permasalahan narkoba (Thompson, 2016).

Tujuan dilakukannya penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang kemudian dijadikan sebagai tinjauan pustaka agar terhindar dari kesamaan topik, jangkauan penelitian, isi, sekaligus memberikan perbedaan yang jelas antara karya

ilmiah yang sebelumnya terbit dengan karya yang sedang penulis susun. Dari semua karya ilmiah yang penulis review belum ada karya ilmiah yang meneliti secara spesifik terkait peranan Investigate PH dalam menangani kasus HAM yang dilakukan oleh Presiden Duterte. Seperti dalam karya ilmiah yang pertama membahas peranan *Civil Society Organizations* (CSOs) dalam mengatasi penanganan kasus HAM di Filipina, tidak secara spesifik meneliti peran INVESTIGATE PH dalam permasalahan HAM di Filipina, tetapi meneliti peran *Civil Society Organizations* (CSOs) dalam permasalahan HAM di Filipina dan penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018. Begitu juga dengan karya ilmiah yang lainnya tidak ada kesamaan dengan topik yang akan penulis teliti. Sehingga, penelitian tentang peran Investigate PH dalam menangani permasalahan HAM di Filipina merupakan penelitian baru. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru dalam karya ilmiah.

1.6 Kerangka Pemikiran

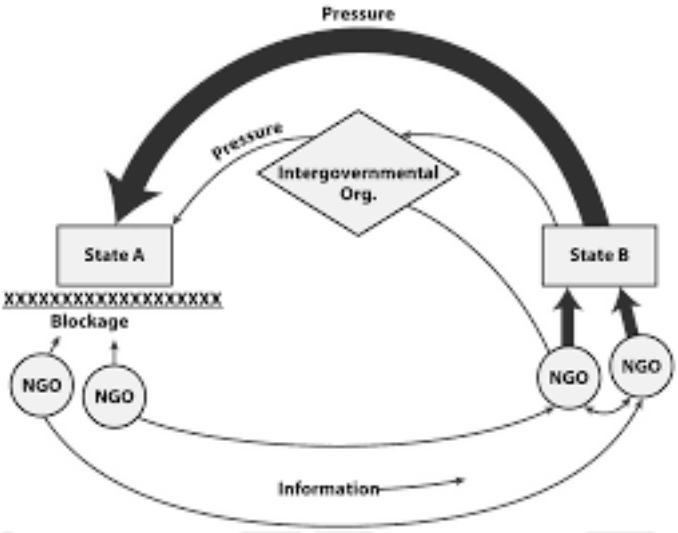
Setelah berakhirnya perang dingin aktor dalam hubungan internasional tidak hanya didominasi oleh negara, banyak aktor-aktor lain yang memiliki peran penting dalam interaksi hubungan internasional, seperti *Non-governmental organization* (NGOs), *multinational organization* (MNC), Individu yang berpengaruh, termasuk *Transnational Advokasi Networks* (TAN's). Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN's) yang digagas oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink sebagai alat

analisis sehingga penulis dapat menentukan arah penulisan. (Sikkink, Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction, 2014)

Margareth Keck dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa *Transnational Advocacy Network* (TAN's) sangat penting untuk menyebarluaskan norma-norma internasional dalam isu hak asasi manusia. Menurut mereka jaringan advokasi internasional secara signifikan berperan dalam membangun hubungan antar aktor dalam negara, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Jaringan advokasi internasional memiliki peranan dalam mempengaruhi kepentingan dan kebijakan negara bahkan organisasi. Keck dan Sikkink juga menjelaskan bahwa terdapat 7 aktor dalam jaringan advokasi transnasional, yaitu : (1). Non-governmental organizationa, (2). Organisasi keagamaan, (3). Pengusaha dan peneliti, (4). Organisasi sosial, (5). Bagian dari organisasi regional antar pemerintah, (6). Yayasan dan media, (7). Badan eksklusif pemerintah.

Menurut Keck dan Sikkink kemunculan *Transnational Advocacy Network* (TAN's) didorong oleh 3 faktor, yaitu: *activist* atau *political entrepreneurs, international conferences,* dan *boomerang pattern.*

Gambar 1.1. Boomerang Pattern



Sumber: (Sikkink, 1999)

Boomerang Pattern merupakan ciri khas dari jaringan advokasi transnasional karena tujuan dari pembentukannya yaitu untuk merubah dan mempengaruhi perilaku negara, pada umumnya bisa dilihat pada isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Terdapat empat strategi dalam konsep *Boomerang Pattern*, yaitu:

1. *Leverage Politics,* yaitu kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari aktor yang memiliki pengaruh lebih besar yang dapat memperkuat jaringan transnasional yang lebih kecil pengaruhnya.
2. *Information politics,* yaitu kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan informasi politik dengan cepat dan kredibel ke tempat yang memiliki pengaruh lebih besar untuk mempengaruhi.

3. *Symbolic politics,* yaitu kemampuan untuk menarasikan dan menyampaikan informasi situasi yang sedang dialami kepada masyarakat dengan simbol-simbol politik.
4. *Accountability Politics,* upaya untuk mengendalikan aktor yang memiliki pengaruh lebih besar agar berpihak pada prinsip yang sudah disepakati dalam jaringan advokasi. (Sikkink, Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction, 2014)

Boomerang Pattern terjadi ketika pemerintah membatasi atau memblokir hubungannya dengan masyarakat, masyarakat akan mencari aliansi dengan membentuk jaringan advokasi untuk mempengaruhi pemerintah. Jika jaringan advokasi lokal masih dibatasi maka mereka akan mencari akses jaringan internasional sehingga membentuk *Transnational Advocacy Networks* (TAN's), jaringan advokasi tersebut akan menekan pemerintah yang melanggar dengan bantuan sekutunya dan organisasi pihak ketiga. Disini terlihat bahwa pola transnasional sangat berperan penting ketika pemerintah yang melanggar norma membatasi hubungannya dengan masyarakat dan jaringan domestik. (Stanati Netipatalachoochote, 2018)

Untuk menilai pengaruh jaringan advokasi harus melihat pencapaian tujuan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Keck dan Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh jaringan berikut:

(1) penciptaan isu dan pengaturan perhatian/agenda;

(2) pengaruh pada posisi diskursif negara

dan organisasi regional dan internasional;

(3) pengaruh terhadap prosedur kelembagaan;

(4) pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'aktor sasaran' yang mungkin negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta seperti perusahaan Nestle;

(5) pengaruh terhadap perilaku negara.

Konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) yang ditulis oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink dirasa cukup efektif untuk melihat upaya jaringan *Transnasional Advokasi Networks* terhadap permasalahan HAM di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte tahun 2020-2021.

1.7 Argumen Sementara

Kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte bertentangan dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak hidup dan hak untuk diadili terlebih dahulu. kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte banyak menuai kecaman dari berbagai pihak baik nasional maupuna internasional. Namun, meskipun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, Presiden Duterte tetap konsisten menjalankan kebijakan *War on Drugs* nya karena hal tersebut dianggap untuk menjaga keamanan nasional negara Filipina. Pemerintah telah menolak partisipasi NGO lokal yang dianggap kritis terhadap pemerintah dan situasi hak asasi manusia. Aktivis sayap kiri dan pembela HAM telah lama menjadi sasaran pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Filipina karena dianggap

telah menghalangi operasi *War on Drugs.* Pembatasan NGO oleh pemerintah menjadi *boomerang pattern* yang akhirnya NGO meminta bantuan lembaga internasional untuk membentuk lembaga investigasi guna membantu menyelesaikan permsalahan HAM di Filipina. Hal tersebut menghasilkan Investigate PH sebagai lembaga independen yang melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM di Filipina. Investigate PH menggunakan 4 strategu dalam menjalankan investigasi yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics,* dan *accountability politics*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap subyek diteliti yang menekankan pada pengumpulan data dan strategi analisis yang bergantung pada data non numerik. (Herdiansyah, 2019) Metode ini akan digunakan oleh penulis yang bertujuan mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini berfokus pada Investigate PH sebagai *Transnational Advocacy Network* dalam mengatasi permasalahan HAM di Filipina. Sedangkan objek penelitian penelitian ini fokus pada tindakan Investigate PH dalam menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Filipina akibat dari kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai sumber data yang digunakan untuk penelitian ini. Data sekunder dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berbasis dokumen (*document-based research*) dan berbasis internet (*internet-based research*). Berdasarkan pada metode pengumpulan data yang digunakan maka pada penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka melalui kajian-kajian tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi yang bersumber dari website resmi INVESTIGATE PH serta artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelusuran pustaka ini pun dilakukan di tempat-tempat seperti perpustakaan-perpustakaan yang berlokasi di kota Yogyakarta untuk mencari sumber-sumber referensi terutama seperti buku.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, pertama penulis melakukan pengumpulan data data sesuai dengan topik yang diambil, untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu penulis untuk memahami dan menganalisis secara lebih mendalam isu terkait. Setelah melakukan proses pengumpulan data, penulis akan memulai analisis dengan membaca dan memahami ide umum dari data data yang telah terkumpul. Tahapan selanjutnya adalah kategorisasi hasil olah data yang telah didapat kedalam bagian bagian untuk mempermudah proses penelitian. Proses kategorisasi hasil olah data ini akan dilanjutkan dengan pembangunan narasi deskriptif sebagai bentuk penjabaran dari hasil yang telah didapatkan. Pembangunan narasi deskriptif kemudian akan dilanjutkan dengan penambahan unsur kritik dan analisis sebagai

tindak lanjut dari data data yang telah terkumpul dan terkategorisasi. Penambahan unsur kritik dan analisis dalam bentuk narasi deskriptif ini menjadi bagian utama dalam penelitian ini, untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

untuk mempermudah untuk memahami dari penelitian ini, maka penulis memaparkan penelitian ini dalam empat bab. Dalam setiap bab terdiri sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain.

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 Konteks Dari Penelitian

Pada bab 2 membahas mengenai pelanggaran HAM dan jaringan *Transnational Advocacy Networks* dalam menangani permasalahan HAM di Filipina

BAB 3 Analisi Teori *Transnational Advocacy Networks* Dalam Mengatasi Permasalahan Ham di Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte.

Pada bab ini akan menganalaisis *Transnational Advocacy Networks* dalam menangani permasalahan HAM di Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte pada tahun 2020 – 2021.

BAB 4 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan pada penelitian serta rekomendasi dari penelitian ini.

BAB 2

KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* PRESIDEN DUTERTE DAN JARINGAN *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* (TAN'S) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI FILIPINA

2.1. Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte

Filipina merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki permasalahan serius dalam penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba di Filipina tidak hanya menjadi masalah keamanan nasional tetapi juga masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi. Laporan PBB tahun 2002 menyatakan bahwa Filipina menempati urutan paling atas di antara negara-negara Asia Timur dalam penyalahgunaan narkoba, dimana 2,2% penduduknya yang berusia 16-64 tahun merupakan pengguna *methamphetamine* (Gavilan, 2016). Menurut survei dari *The DDB's National Household Survey* terdapat sekitar 1.8 juta orang pengguna di Filipina yang tidak memiliki pekerjaan. PDEA pada 2016 melaporkan bahwa 26,91% atau 11.321 dari 42.065 *barangay* terpengaruh narkoba (Philippines National Police, 2016).

Setelah terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina tahun 2016, Duterte membawa perubahan besar terkait penanganan narkoba di negaranya. Pada kampanye politik pencalonannya, Presiden Duterte mengkampanyekan akan memberantas pengguna narkoba di Filipina sampai ke akarnya. Dalam menangani permasalahan narkoba di negaranya, Presiden Duterte membuat kebijakan "*War on Drugs*" yang diimplementasikan berdasarkan *Command Memorandum Circular* (CMC) No. 16 – 2016 mengenai *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan –Project: "Double Barrel*". Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang secara sistematis

untuk memberantas penggunaan narkoba di Filipina (Philippines National Police, 2016). *War on Drugs* diambil karena pemerintahan sebelumnya dianggap belum bisa mengatasi permasalahan narkoba dengan tuntas maka Duterte secara tegas berkampanye akan membunuh para pengedar narkoba dan melakukan perang terhadap pelakunya. Presiden Duterte memberlakukan kembali hukuman mati sebagai bagian dari kebijakannya yang sebelumnya sudah dihapuskan oleh pemerintah Filipina pada tahun 2006 (The Guardian, 2016). Menurut Iris Ulvang, seorang jurnalis Filipina, kebijakan yang diambil Presiden Rodrigo Duterte merupakan hutang politik ketika Duterte berkampanye maju sebagai calon Presiden Filipina. Hal itu menarik simpati masyarakat yang ingin negaranya aman dari narkoba khususnya wilayah yang jauh dari Manila. Bahkan konstituen Duterte yang sebelumnya tidak berpihak pada Duterte berbalik arah untuk mendukung Duterte karena komitmennya untuk meningkatkan keamanan Filipina (Republika, 2016).

Dalam menjalankan kebijakan *War on Drugs* nya Duterte memerintahkan aparat kepolisian untuk mengeksekusi mati para pengguna narkoba yang tidak mau ditahan. Keberadaan kebijakan *War On Drugs* juga telah memberlakukan kembali 30 pasal terdiri dari *Republic Act* 7080, *Republic Act* 6539, *Republic Act* 3815, *Republic Act 9346*, dan *Republic Act 9145*. Sebagai basis hukum dalam menangani permasalahan narkoba, Duterte telah melakukan amandemen pada pasal 9 *Republic Act 9145* yang disetujui oleh *House of Representatives* (HoR) yang berisi hukuman bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba yaitu dikenakan denda 500.000 peso sampai 10.000.000 peso. Pasal tersebut juga berisi hukuman penjara seumur

hidup hingga hukuman mati bagi orang yang menyalahgunakan narkoba. (Sianturi, 2021)

2.1.1 Projek *Double Barrel* Sebagai Implementasi Kebijakan *War On Drugs* President Duterte

Dalam menjalankan kebijakan *War On Drugs* untuk memberantas narkoba di Filipina, Presiden Duterte memberlakukan operasi *Double Barrel* dengan tujuan untuk mewujudkan *Barangay Drugs Clearing Strategy* atau strategi pemerintahan Duterte untuk membersihkan persoalan narkoba di negaranya. *Barangay Drugs Clearing Strategi* merupakan regulasi yang dikeluarkan pada 2004 oleh *Barangay Anti-Drugs Abuse Councils* (BADAC) kemudian disempurnakan pada tahun 2007 di bawah perintah *Dangerous Drugs Board* (Dangerous Drugs Board , 2007). Regulasi tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan dan pemakaian narkoba. Operasi ini juga digunakan Presiden Rodrigo Duterte untuk memberantas permasalahan narkoba pada lingkaran *barangay* dan secara resmi mulai berlaku 1 Juli 2016 melalui surat perintah No. 16 tahun 2016. Surat perintah ini berisi operasi *Double Barrel* atas perintah langsung Presiden Duterte untuk memberantas permasalahan narkoba di Filipina. Operasi ini tidak boleh dijalankan di luar prosedur dan konsep dalam surat komando *Philippines National Police* yang dikeluarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Operasi *Double Barrel* juga memberi kewenangan pada kepolisian daerah untuk untuk melakukan operasi di wilayahnya bertugas untuk memberantas orang-orang yang berhubungan dengan narkoba dalam keadaan hidup atau mati (Philippines National Police, 2016). Duterte

menunjuk Ronald M. Rosa yang saat itu menjadi Kepala Kepolisian Filipina untuk menjadi penanggung jawab atas operasi *Double Barrel.* Dalam menjalankan operasi *Double Barrel* terdapat dua pendekatan yang dijalankan polisi Filipina untuk membersihkan narkoba di Filipina, yaitu *Project Tokhang* dan *Project HVT* (Philippines National Police, 2016).

Project Tokhang adalah kependekan dari *Toktok* dan *Hangayo* yang artinya mengetuk dan permintaan. *Tokhang* merupakan operasi yang dijalankan polisi Filipina dengan menghampiri rumah-rumah orang yang memiliki keterlibatan dengan narkoba baik pengguna maupun pengedar. Polisi tidak hanya menangkap tetapi juga memperingatkan pengguna dan pengedar untuk berhenti mengedarkan dan memakai narkoba. Presiden Duterte memerintahkan para aparat kepolisian agar tidak pandang bulu dalam memberantas pengguna narkoba, jika ada pengguna atau pengedar narkoba yang melakukan perlawanan polisi diijinkan untuk melumpuhkan hingga membunuh, Duterte menganggap bahwa tindakan membunuh pelaku kriminal bukan termasuk pada pelanggaran HAM (Salaverria, 2017). Dalam menjalankan operasi *Tokhang* terdapat lima tahapan yang dilakukan *Philippines National Police,* yaitu.

1. Pengumpulan dan pengesahan informasi (*Collection and Validation of Information Stage*). Pada tahap ini kepolisian Filipina ditugaskan untuk mengumpulkan dan memeriksa seluruh informasi identitas dan lokasi para pengguna dan pengedar narkoba. Informasi tersebut harus valid dan

kredibel sumbernya karena akan dijadikan dasar *Philippines National Police* dalam menjalankan operasi *Tokhang*.

2. Koordinasi (*Coordination Stage*). Tahap ini merupakan tahapan koordinasi antar lembaga terkait seperti badan-badan anti narkoba, LSM anti narkoba, unit kepolisian dan pemerintah lokal agar operasi *Tokhang* berjalan dengan maksimal. Pada tahap ini *Philippines National Police* berkoordinasi dengan pemerintahan lokal di Filipina dan *Barangay Anti-Drug Abuse Council's* (BADAC) untuk mendapatkan informasi lokasi keberadaan para pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Unit narkoba *Philippines National Police* melakukan koordinasi dengan *The Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) untuk melakukan investigasi pada para pengedar narkoba.
3. Kunjungan rumah ke rumah (*House to House Visitation Stage*). Tahapan ini merupakan tahapan eksekusi dari operasi *Tokhang*. Tidak sembarang orang dapat menjalankan proses ini, terdapat tim khusus yang ditunjuk untuk datang ke rumah-rumah para pengguna dan bandar narkoba dan harus dilaksanakan secara serempak secara nasional. Terdapat dua strategi yang bisa dijalankan oleh tim. Pertama, jika para pengguna atau pengedar kooperatif akan diperlakukan melalui proses hukum yang berlaku. Kedua, jika para pengguna memberontak dan berusaha melarikan diri, tim khusus dapat melumpuhkan pelaku hingga menembak mati ditempat. Menurut pemerintah, pelaku yang mati dalam operasi ini nantinya dianggap korban dari kebijakan *War on Drugs*.

4. Proses dan dokumentasi (*Processing and Documentation Stage*). Dalam tahapan ini, orang-orang yang terlibat dengan narkoba secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi dan wajib mengisi formulir yang sudah disiapkan. Orang-orang yang menyerahkan diri secara sukarela wajib melakukan sumpah di depan notaris, dibantu oleh penasihat hukum dan disaksikan oleh keluarga atau kerabat, kemudian para tersangka akan diminta keterangan di kantor polisi setempat dan memberikan obat-obatan yang masih ada kepada polisi. Mereka akan dikenakan hukuman khusus sesuai ketentuan undang-undang No. 33 pada RA 9165. Dalam pelaksanaan operasi rumah ke rumah seluruh tim harus mengenakan seragam yang sudah ditetapkan kemudian memberikan laporan hasil investigasi kepada Direktur Regional PROs melalui *the Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (RAIDSOTG) paling lambat 24 jam setelah melakukan operasi.
5. Monitoring dan evaluasi (*Monitoring and Evaluating Stage*) (Philippines National Police, 2016). berdasarkan laporan-laporan tim sebelumnya, pihak kepolisian berkoordinasi dengan ADACs untuk melakukan penangkapan para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap unit kepolisian setempat dan unit anti-narkoba harus melakukan pemantauan para pelaku dan memberikan laporan hasil pemantauannya kepada Direktur Regional PROs melalui *the Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (RAIDSOTG). Direktur Regional PROs harus menyerahkan laporan mingguan pada Direktorat Operasi (DO (Philippines National Police, 2016)).

Project HVT (*High Value Target*) atau *The upper barrel project* merupakan tindakan operasi anti obat-obatan terlarang dengan target tokoh-tokoh yang menjalankan obat-obatan terlarang dan sindikat narkoba. Operasi ini dilaksanakan oleh tim khusus dari AIDG, PRO, NCRPO, PPO, dan CPO. Tim *Project* HVT terdiri dari operasi intelijen, penyelidik, dan personel taktis dari Unit Pendukung Nasional yang akan dirinci ke AIDG, sementara tim dari PRO, Distrik NCRPO, PPO dan CPO akan dihasilkan dari Unit Dukungan Regional dan Pasukan Keamanan Publik. (Philippines National Police, 2016)

Operasi *Project* HVT (*High Value Target*) dilakukan secara lebih luas daripada operasi *Tokhang*, dimana akan diterapkan di tingkat nasional, regional, provinsi dan kota. Selain itu akan dibagi fungsi operasional agar menghindari tumpang tindih. *Anti-Illegal Drug Group* (AIDG) menjalankan operasi anti narkoba dengan fokus pada penjual narkoba di tingkat nasional, regional dan internasional. *Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (RAIDSOTG) fokus operasi pada perdagangan narkoba ilegal lintas batas wilayah regional yang dipimpin oleh Direktur Regional. *Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (PAIDSOTG) yang dipimpin oleh Direktur Provinsi, PPO, *District AntiIllegal Drugs Special Operation Task Group* (DAIDSOTG) melakukan operasi pemberantasan perdagangan narkoba ditingkat lintas batas kota yang dipimpin oleh direktur kota, CPO/COP, CPS. *Station Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (SAIDSOTG) yang dipimpin oleh panglima/COP melakukan operasi pembersihan *barangay* sesuai dengan Peraturan DDB No.2 Seri Tahun 2007. (Philippines National Police, 2016)

Menurut laporan, total 10.721 orang dari operasi HVT ditangkap dari 1 Juli 2016 hingga 31 Oktober 2020. Berdasarkan Laporan PDEA menunjukkan bahwa operasi HVT berhasil menangkap 287 orang asing, 362 pejabat terpilih, 102 personel berseragam, 445 pegawai pemerintah, 3.098 target individu yang terdaftar, 751 pemimpin dan anggota kelompok narkoba, 66 anggota kelompok bersenjata, 1.035 pengelola sarang narkoba, 232 buronan, 18 selebriti, dan 4.325 penangkapan dari operasi berdampak tinggi. Dengan target "Filipina yang dibersihkan dari narkoba", catatan PDEA mengungkapkan bahwa 266.126 tersangka narkoba ditangkap dalam 183.525 operasi anti narkoba yang dilakukan selama periode yang sama. Laporan PDEA yang sama menunjukkan bahwa 5.942 tersangka pelaku narkoba tewas dalam operasi tersebut (Philippines National Police, 2016).

Badan obat anti-ilegal terkemuka Filipina mencatat bahwa 20.538 dari 42.045 *barangay* di negara itu telah dinyatakan bebas narkoba sementara 14.308 lainnya belum dibersihkan. Data PDEA juga menambahkan bahwa 648 sarang dan laboratorium klandestin telah dibongkar. Beberapa obat dan peralatan yang disita senilai PHP56,26 miliar dimusnahkan selama operasi pada periode tersebut. Sekitar 7.413,17 kilogram sabu senilai PHP46,42 miliar juga disita. Dalam operasi yang sama, PDEA mengatakan 3.418 anak yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang berhasil diselamatkan (Caliwan, 2020).

2.1.2. Pelanggaran HAM Dalam Pelaksanaan Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte

Hak Asasi Manusia diatur oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *Universal Declaration of Human Rights.* Dalam menegakkan HAM negara-negara di dunia telah menyepakati dan menerima instrumen-instrumen HAM yang tertuang di *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati, mematuhi, dan melindungi HAM warga negaranya termasuk Filipina. Pasal 6 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa tidak ada manusia yang boleh merenggut hak hidup manusia lainnya secara sewenang-wenang. Hak tersebut telah melekat pada pada setiap orang sejak dalam kandungan dan harus dilindungi oleh hukum. Selain itu dalam DUHAM yang diadopsi dan diratifikasi pada 10 Desember tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB, terdiri dari 30 pasal yang membahas hak-hak dasar setiap manusia. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak diadili dan hak asas praduga tak bersalah sebelum dijatuhi hukuman (United Nation, 1948).

Filipina merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi perjanjian DUHAM. Filipina juga ikut serta dan meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia, yaitu *Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide, dan Rome Statute of the International Criminal Court, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or*

Degrading Treatment or Punishment (CAT), *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (University of Minnesota, 2014).

Meskipun telah meratifikasi dan tergabung dalam perjanjian internasional terkait HAM, implementasi kebijakan *War on Drugs* telah melanggar komitmen Filipina terhadap HAM karena banyak orang yang meninggal tanpa melalui proses hukum. Data resmi pemerintah Filipina melaporkan bahwa pada awal diterapkan kebijakan sampai tahun 2018 korban tewas lebih dari 5000 orang (ALJIBE, 2018). Pelanggaran HAM tersebut dapat dilihat dari cara polisi Filipina melakukan penembakan tanpa proses hukum kepada pelaku-pelaku yang memiliki keterkaitan dengan narkoba (Reyes, 2016). Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Presiden Duterte tidak akan pandang bulu dalam melaksanakan kebijakannya dan akan mengesampingkan HAM. Oleh karena itu, kebijakan *War on Drugs* mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Salah satu aksi protes terhadap kebijakan Duterte dilaksanakan pada 24 Februari 2018, sekitar seribu umat Katolik Filipina melakukan aksi protes kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte di taman Luneta Manila dengan cara *"walk for life*". Mereka menyanyikan himne dan berdoa rosario ketika uskup dan kardinal Filipina membacakan khotbah menentang kebijakan Duterte yang dianggap telah melanggar hak dasar manusia karena telah membunuh orang atas kehendak sendiri (AL JAZEERA, 2018). Selain itu, pada tahun 2020 netizen dan

selebriti Filipina melakukan aksi protes pembunuhan di luar hukum yang dilakukan pemerintah melalui media sosial dengan tagar *#EndPoliceBrutality #JusticeForSonyaGregorio #StopTheKillingsPH* dan *#PulisAngTerorista* yang *tranding* di *twitter* Filipina. (GOZUM, 2020)

Amnesti Internasional pada 31 Januari 2017 telah merilis laporan hasil investigasi lapangannya terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte. Delegasi Amnesti Internasional mewawancarai 110 orang, termasuk saksi yang melihat pembunuhan di luar proses hukum, aktivis masyarakat, kerabat dari korban pembunuhan, petugas operasi *war on drugs*, dan orang yang berwenang dalam tingkat lokal. Laporan hasil investigasi tersebut menyatakan bahwa Pemerintah merekrut orang-orang sipil untuk melakukan operasi dengan imbalan bayaran 10.000 peso per pembunuhan, orang-orang bayaran dan petugas polisi operasi *War on Drugs* dari 1 juli 2016 sampai 21 januari 2017 telah membunuh 7.025 orang. Petugas polisi dan orang-orang bayaran operasi *War on Drugs* menargetkan orang-orang yang diduga terlibat dengan narkoba, banyak orang yang ditembak mati di temapat tanpa melalui proses hukum. (Amnesty International, 2017)

Seorang pengacara Filipina Abernama Sabio mewakili Edgar Matobato yang berperan sebagai regu tembak operasi *War on Drugs* melaporkan tindakan pembunuhan di luar hukum ke *International Criminal Court* (ICC). Dalam laporannya menjelaskan bahwa kebijakan *War on Drugs* Duterte tidak semuanya berlandaskan hukum dan legal, banyak orang yang ditembak mati tanpa proses

pengadilan. Dalam laporannya juga menyebutkan bahwa setidaknya 11 pejabat senior pemerintah harus bertanggung jawab atas aksi pembunuhan di luar hukum. Baru satu tahun Presiden Duterte menjabat, setidaknya 5000 lebih orang telah terbunuh. (Kompas, 2017) Kantor kejaksaan *ICC* pada Februari 2018 memulai penyelidikan atas kematian ribuan orang pengguna dan pengedar narkoba di Filipina, termasuk orang-orang yang yang ditembak mati di tempat oleh penegak hukum (Patel, 2018).

Pada 14 Desember 2020 ICC menerbitkan laporan "*Report on Preliminary Examination Activities 2020"*. Dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar korban yang terbunuh merupakan orang-orang yang dilaporkan oleh pihak berwenang karena diduga terlibat dalam penggunaan, penjualan, atau produksi baik secara langsung atau mendukung atas obat-obatan terlarang, atau dalam beberapa kasus, individu yang memiliki keterlibatan dengan pengguna atau pengedar narkoba. Menurut Jaksa ICC, Bensouda mencatat bahwa selain pembunuhan terkait narkoba, beberapa individu diduga mengalami perlakuan buruk dan pelecehan serius sebelum dibunuh oleh pihak berwenang dan aktor bayaran operasi *War on Drugs* setelah ditangkap dan saat ditahan sebelum mereka dijatuhi hukuman. Informasi didapatkan ICC memberikan dasar kuat bahwa terdapat kejahatan kemanusiaan dalam operasi *War on Drugs* presiden Duterte yang melanggar Statuta Roma, yaitu pada pasal 7(1)(k) penyiksaan dan penjatuhan cedera fisik yang serius dan kerusakan mental karena tindakan tidak manusiawi, pasal 7(1)(a) tentang pembunuhan, dan pasal 7(1)(f) penyiksaan yang dilakukan tim operasi *War on Drugs* (The Office of the Prosecutor, 2020).

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) juga merilis laporan situasi HAM Filipina pada 29 Juni 2020. Laporannya menyatakan, lebih dari 8000 orang mati dalam operasi *war on drugs* Presiden Duterte, terdapat 248 aktivis hak asasi manusia, anggota serikat pekerja, dan jurnalis meninggal sejak diterapkannya kebijakan tersebut. Mereka mengutuk keras tindakan operasi *War on Drugs* yang telah menewaskan banyak orang. Dalam laporan tersebut menjelaskan, anggota keluarga korban, saksi, jurnalis dan pengacara yang telah diwawancarai oleh perwakilan *United Nations Commission on Human Rights* mengungkapkan ketakutan atas keselamatan mereka dan rasa ketidakberdayaan dalam mencari keadilan, mereka kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan di dalam negeri karena dibatasi pemerintah (Human Rights Council, 2020). tidak adanya mekanisme domestik, diperlukan penyelidikan independen dan kredibel atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Filipina. Komisaris Dewan HAM PBB akan membantu dalam upaya kredibel baik di nasional maupun di internasional (United Nation, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa banyak masyarakat Filipina yang ditembak mati ditempat tanpa proses pengadilan terlebih dahulu oleh aparat pemerintah ketika melakukan operasi kebijakan *War on Drugs*. Hal tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan *War on Drugs* telah bertentangan dan melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Filipina juga sudah melanggar beberapa perjanjian terkait HAM yang sudah diratifikasi berbagai negara termasuk Filipina. Seperti dalam *Universal Declaration of Human Right* PBB 1984, bahwa setiap manusia memiliki asas praduga tak bersalah dimana

seharusnya para pelaku harus diadili terlebih dahulu oleh penegak hukum Filipina sebelum dijatuhi hukuman mati (Ekoputro, 1985).

2.2. Jaringan *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) Dalam Menangani Permasalahan HAM di Filipina

Terbentuknya *Boomerang Pattern* ketika pemerintah membatasi atau memblokir hubungannya dengan masyarakat, masyarakat akan mencari aliansi dengan membentuk jaringan advokasi untuk mempengaruhi pemerintah. Jika jaringan advokasi lokal masih dibatasi maka mereka akan mencari akses jaringan internasional sehingga membentuk *Transnational Advocacy Networks* (TAN~~'s~~) (Sikkink, Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction, 2014).

Jaringan advokasi tersebut akan menekan pemerintah yang melanggar dengan bantuan sekutunya dan organisasi pihak ketiga. Di sini terlihat bahwa pola transnasional sangat berperan penting ketika pemerintah yang melanggar norma membatasi hubungannya dengan masyarakat dan jaringan domestik (Stanati Netipatalachoochote, 2018).

Pemerintah Filipina melakukan pembatasan komunikasi terhadap organisasi lokal Filipina yang melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Pada 16 Agustus 2017 Presiden Duterte memperbolehkan aparat kepolisian nasional Filipina untuk menembak orang-orang yang terlibat dalam aktivisme melawan kebijakan *War on Drugs.* Hal tersebut berdampak terhadap aktivis HAM Filipina, mereka sering mendapatkan kekerasan,

intimidasi, pelecehan, bahkan ditembak mati oleh aparat ketika memperjuangkan HAM. Human Rights Watch menemukan bahwa pemerintah telah menolak partisipasi LSM yang dianggap kritis terhadap pemerintah dan situasi hak asasi manusia. Menurut HRW, Aktivis sayap kiri dan pembela HAM telah lama menjadi sasaran pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Filipina karena dianggap telah menghalangi operasi *Double Barrel*. Hal tersebut terbukti ketika pria bersenjata tak dikenal pada 17 Agustus 2020, menembak mati Zara Alvarez, seorang pengacara dari *Karapatan Alliance Philippines* di Kota Bacolod di Filipina tengah. Alvarez adalah anggota Karapatan ke-13 yang tewas selama pemerintahan Duterte. Pembunuhan Alvarez terjadi seminggu setelah pemimpin petani Randall Echanis ditemukan tewas, setelah disiksa di rumahnya di Quezon City (Human Right Watch, 2022).

Mengutip dari *Bloody Sunday*, polisi dan militer melakukan operasi serentak di provinsi Batangas, Cavite, Laguna dan Rizal di sekitar Manila, dalam operasi tersebut terdapat 9 aktivis HAM meninggal dan 6 orang ditangkap oleh aparat (Luna, 2021). Dalam laporan Dewan HAM PBB sesi ke 44 pada 4 Juni 2020 menyatakan bahwa banyak pembela HAM terbunuh setelah diterapkannya kebijakan *War on Drugs*, setidaknya 248 pembela HAM, pengacara, jurnalis, dan serikat pekerja terbunuh oleh aparat dalam kurun waktu 2015 sampai 2019. Menurut laporan tersebut, selalu ada impunitas terhadap pelaku kejahatan HAM. Hanya satu hukuman terhadap pelaku atas pembunuhan seorang tersangka narkoba dalam operasi polisi sejak pertengahan 2016. Para saksi, anggota keluarga, jurnalis dan pengacara yang diwawancarai oleh Kantor HAM PBB mengungkapkan

kekhawatiran atas keselamatan mereka dan merasa tidak berdaya untuk mengakses keadilan di dalam negeri (United Nation, 2022).

Meskipun kebijakan *War on Drugs* mendapat kecaman dari berbagai pihak, Duterte dalam beberapa pidatonya mengatakan akan terus melakukan operasi *War on Drugs* agar masa depan rakyat Filipina lebih baik. Duterte juga mengatakan tidak akan pandang bulu untuk memberantas orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan narkoba dan akan membunuh siapapun yang melawan dalam operasi *War on Drugs* (Human Right Watch, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pemerintah Filipina melakukan tindakan *blockage* kepada organisasi-organisasi HAM domestik yang melakukan protes terhadap operasi yang dilakukan pemerintah Filipina dalam implentasi kebijakan *War on Drugs* presiden Duterte. Tindakan *blockage* pemerintah Filipina dilakukan dengan berbagai cara, seperti menembak mati aktivis HAM dan menindak tegas orang-orang yang mencoba protes terhadap operasi *War on Drugs*.

Di tengah budaya impunitas dan ketidakmampuan sistem peradilan domestik yang berlaku, Dewan HAM PBB Dewan HAM PBB pada akhir sesi ke-45 tahun 2020 hanya memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada pemerintah Filipina untuk pemajuan hak asasi manusia (Investigate PH, 2020). Kerjasama teknis Dewan HAM PBB dan pemerintah Filipina fokus pada enam bidang utama yang sudah penulis jelaskan sebelumnya (Human Right Watch, 2022).

Meskipun Dewan HAM PBB memberikan bantuan teknis berupa Kerjasama dengan pemerintah Filipina, Dewan HAM PBB tidak mampu meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Filipina menggunakan mekanisme internasional meskipun sudah terbukti terdapat pelanggaran HAM. Selain itu, bantuan teknis yang diberikan Dewan HAM PBB tidak memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di Filipina. Oganisasi-organisasi masyarakat sipil Filipina seperti *Karapatan Alliance Philippines, National Union of People's Lawyers (NUPL), Ecumenical Voice for Human, Rights and Peace in the Philippines*, dan *Civicus World Alliance for Citizen Participation* pada sesi ke 45 Dewan HAM PBB menyampaikan tuntutan kepada Dewan HAM PBB untuk menjalankan mandatnya dan segera menciptakan mekanisme investigasi yang independen dan tidak memihak atas maraknya pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran HAM di Filipina. (act.350.org, 2020).

Mereka merasa frustasi karena susah mendapatkan keadilan di dalam negeri, menurut mereka pemerintah tidak menghormati HAM. Para aktivis berharap bahwa para pelaku kejahatan HAM diadili di hadapan pengadilan, tribunal atau badan mana pun yang bertindak secara independen, tidak memihak, dan efektif, memiliki kesetiaan pada HAM dan keadilan, bukan pada kekuasaan pemerintah Filipina. Mereka membutuhkan penyelidikan independen atas pelanggaran HAM di Filipina. Mereka juga berharap penyelidikannya tidak melindungi dan membebaskan orang yang pelaku kejahatan HAM tersebut. Menurut mereka tindakan Dewan HAM PBB dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencegah pelanggaran HAM lebih lanjut di Filipina (act.350.org, 2020).

Di tengah krisis HAM yang terjadi di Filipina akibat diterapkannya kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte, Dewan HAM PBB pada akhir sesi ke-45 tahun 2020 hanya memberikan kerjasama teknis dan pembangunan kapasitas untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Filipina. (Investigate PH, 2020). Kerjasama teknis Dewan HAM PBB dan pemerintah Filipina, fokus pada enam bidang utama:

(1) memperkuat mekanisme investigasi dan akuntabilitas HAM dalam negeri;

(2) melakukan pendataan dugaan pelanggaran polisi;

(3) keterlibatan masyarakat sipil dan Komisi HAM Filipina;

(4) penguatan pelaporan nasional;

(5) pendekatan berbasis HAM untuk pengendalian narkoba; dan

(6) pendekatan kontra terorisme berbasis HAM.

Program bersama PBB dengananggaran awal sebesar US$10 juta ditunjuk untuk melaksanakan mandat pembangunan kapasitas HAM bersama dengan berbagai badan pemerintah Filipina dan Kantor Komisaris Tinggi HAM dimulai pada 1 Agustus 2021, dan akan berakhir pada 31 Juli 2024 (Human Right Watch, 2022).

Setelah adanya tekanan NGO lokal Filipina terhadap Dewan HAM PBB. Investigate PH muncul sebagai perwujudan dari jaringan yang terbentuk sebagai manifestasi *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) akibat dari tuntutan organisasi masyarakat sipil Filipina kepada Dewan HAM PBB untuk membentuk mekanisme investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Filipina.

Investigate PH adalah wujud dari jaringan yang terbentuk sebagai manifestasi *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) akibat dari tuntutan organisasi masyarakat sipil Filipina kepada Dewan HAM PBB untuk membentuk mekanisme investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Filipina. Investigate PH melakukan investigasi independen atas pelanggaran HAM di Filipina, termasuk pembunuhan di luar hukum akibat dari kebijakan *War on Drugs* dan serangan yang dilakukan negara terhadap aktivis dan masyarakat sipil. Hasil investigasi Investigate PH juga digunakan untuk lebih memperkuat laporan penting Juni 2020 dari *the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) tentang situasi hak asasi manusia Filipina. Investigate PH diisi oleh tujuh belas individu terkemuka yang kredibel dan memiliki komitmen terhadap HAM di Filipina. Tujuh belas individu tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu Komisaris Tingkat Tinggi dan Sub-Komisaris. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, seperti dari Persekutuan Gereja-Gereja Reformasi Dunia, pengacara, dan Greens Party, Australia (Investigate PH, 2021).

Investigate PH merupakan lembaga pertama yang melakukan investigasi Independen terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina. Independensi yang dimiliki Investigate PH menjadi kekuatan bagi Investigate PH dalam melakukan investigasi karena tidak ada aturan yang menghalangi tindakan investigasi seperti aturan yang terdapat pada organisasi ASEAN. Meskipun sebagai lembaga independen, Investigate PH tidak meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada pemerintah Filipina tetapi hanya melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Filipina. Investigate PH menyerahkan dan menyampaikan

hasil investigasinya kepada badan-badan PBB yang relevan seperti Dewan HAM dan ICC agar mereka membuat mekanisme internasional untuk menanggulangi masalah Ham di Filipina. Investigate PH mendesak mereka menggunakan mekanisme internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM di Filipina dan memberikan keadilan kepada para korban (Investigate PH, 2020).

Kemunculan Investigate PH terinspirasi dari misi solidaritas internasional dan pencarian fakta selama bertahun-tahun di Filipina sejak negara tersebut mengalami darurat militer, yang kemudian temuannya dipresentasikan dan membuat rekomendasi berbasis bukti kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar ditindaklanjuti. Sejak tahun 2020 Investigate PH mulai berperan dalam penyelidikan atas kejahatan HAM di Filipina akibat dari kebijakan *War On Drugs* yang dikeluarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Investigate PH bergantung pada komunitas internasional yang peduli pada HAM, termasuk serikat pekerja, gereja, organisasi internasional non-pemerintah, organisasi HAM, dan individu yang memiliki solidaritas terhadap orang-orang Filipina. Investigate PH melakukan investigasi atas pelanggaran sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Filipina, dan perdamaian, pembangunan, dan pengingkaran hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri termasuk pembunuhan di luar hukum. Hasil investigasi Investigate PH akan disampaikan pada Dialog Interaktif dan Debat Umum sesi ke-48 Dewan HAM PBB pada September 2021 ketika Komisaris Tinggi akan memperbarui implementasi kerja sama teknis HAM dengan pemerintah Filipina. Laporan tersebut juga akan diberikan kepada badan-badan PBB yang memiliki keterkaitan dengan HAM

seperti ICC, Dewan Keamanan PBB, dan Sidang Khusus Majelis Umum PBB (Idrus, 2021).

Jaringan *Transnational Advocacy Networks* melakukan upaya-upaya investigasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Filipina di bawah kekuasaan Duterte. Jaringan *Transnational Advocacy Networks* memberikan informasi berkala kepada publik terkait perkembangan situasi hak asasi manusia di Filipina melalui website resmi Investigate PH dan media sosial twitter. Website Investigate PH tidak hanya memberikan informasi terkait perkembangan hak asasi manusia di Filipina, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat seluruh dunia untuk menjadi bagian investigasi. Mereka membuka donasi yang hasilnya untuk membiayai kegiatan investigasi. Selain berdonasi, masyarakat juga bisa menjadi partisipan atau volunteer yang bisa membantu investigasi. Tugas dari volunteer yaitu untuk membantu Jaringan *Transnational Advocacy Networks* dalam penulisan, penelitian, translator, desainer, dan pengelolaan website. Kemudian jika sebagai partisipan, mereka bisa memilih menjadi bagian dari sub-komisi yang terlibat langsung dalam investigasi atau menjadi *endorser* baik secara organisasi maupun individu dengan tugas mendukung dan mempromosikan Jaringan *Transnational Advocacy Networks* kepada masyarakat secara luas. *Endorsers* organisasi yang sudah terlibat dengan Investigate PH, seperti; Aksi Solidaritas Tiers Monde (ASTM), Solidaritas Filipina Belanda, Organisasi Solidaritas Kanada-Filipina – Toronto, *Partera Peacebuilders International,* KAIROS*: Canadian Ecumenical Justice Initiatives,* Gereja Anglikan Kanada. *Endorsers* individu yang terlibat Investigate PH, yaitu; Hannah Neumann, Dr. Bernd Basting, Julia Schatten,

Dr. Bernard Hoeper, Dr. Rainer WerningJörg Schwieger, dan Clemens Jürgenmeyer. Keterlibatan mereka merupakan bentuk dukungan atas investigasi HAM di Filipina (Investigate PH, 2020).

Jaringan *Transnational Advocacy Networks* melakukan survei dan pemeriksaan pada 49 kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun waktu 2020 dan 2021. Kemudian melakukan wawancara secara langsung terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Filipina melalui telepon dan video online. Tim Hukum Jaringan *Transnational Advocacy Networks* mengumpulkan dan memvalidasi bukti data yang sudah ada saat ini. Tim hukum juga meninjau dokumen laporan pelanggaran HAM dan catatan pengadilan. Selain itu, anggota Jaringan *Transnational Advocacy Networks* melaksanakan rapat pleno dengar pendapat, beberapa perwakilan korban dan saksi diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian atas kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil investigasi ini menjadi laporan awal Jaringan *Transnational Advocacy Networks* dan disampaikan pada Dialog Interaktif dan Debat Umum Sesi ke-46 Dewan HAM PBB pada Maret 2021 (Investigate PH, 2021). Laporan Investigate PH merupakan hasil investigasi dalam kurun waktu Juni 2020 sampai Maret 2021 yang fokus membahas terkait represi politik yang dilakukan negara yang terus meningkat sejak Juni 2020 dan membahas ketidakmampuan domestik Filipina dan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran HAM. Laporan ini akan memberikan pembaruan tentang situasi HAM di Filipina sejak laporan 4 Juni 2020 (A/HRC/44/22) dari OHCHR (Investigate PH, 2021).

Dari beberapa laporan investigasi Jaringan *Transnational Advocacy Networks* menunjukkan bahwa pelanggaran berat HAM telah meningkat sejak laporan Juni 2020 (A/HRC/44/22) dari OHCHR, dan laporan Oktober 2020 resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang bantuan teknis dan peningkatan kapasitas kepada pemerintah Filipina mengenai tanggung jawab HAM. Pembunuhan polisi terhadap warga sipil dalam "*War on Drugs*" telah melonjak selama *lockdown* COVID-19 sejak Agustus 2020, pembunuhan semacam itu rata-rata naik 50 hingga 76 persen per bulan, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum *lockdown* (OHCHR, 2020).

Klaim dari pemerintah Filipina di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni dan Oktober 2020, dan pada bulan Februari 2021 bahwa mekanisme akuntabilitas domestik berfungsi sebagaimana mestinya. Fakta di lapangan sebaliknya, pemerintah justru melakukan kekerasan dan menghalangi penyelidikan. Ketika ada yang melakukan investigasi atas pelanggaran HAM di Filipina, lembaga pemerintah seperti polisi, militer, dan badan narkotika Filipina menghalangi setiap langkah investigasi (Kompas, 2017).

Para korban HAM kecewa terhadap pemerintah karena mereka sulit mendapatkan keadilan. Ombudsman, yang menangani pengaduan terhadap petugas secara rutin menolak sebagian besar kasus yang dilaporkan masyarakat. Pembela HAM selalu ditolak oleh pengadilan ketika memberikan pengaduan dan justru sering mendapatkan ancaman dari pemerintah seperti dibunuh. Penggerebekan polisi di Tagalog Selatan pada 7 Maret 2021, yang mengakibatkan pembantaian

sembilan anggota serikat pekerja, pemimpin adat, dan organisator miskin kota di rumah dan kantor mereka, menunjukkan bahwa adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Filipina. Krisis HAM di Filipina muncul dari konflik ekonomi, sosial dan politik yang mendalam dan berkepanjangan di masyarakat, termasuk hubungan internasionalnya (Amnesty International, 2017).

Berdasarkan laporan hasil investigasi, Jaringan *Transnational Advocacy Networks* menawarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Filipina, Dewan HAM PBB, ICC, termasuk kepada indivdu yang peduli terhadap HAM di Filipina. Rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan bertujuan agar pemerintah Filipina patuh terhadap perjanjian dan kewajiban HAM internasional seperti *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Selain itu, Investigate PH meminta agar lembaga PBB yang menaungi HAM dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku kejahatan HAM menggunakan mekanisme internasional (Investigate PH, 2021).

Meskipun hanya melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM, jaringan *Transnational Advocacy Networks* telah meningkatkan harapan di antara para korban bahwa bantuan dan keadilan bisa datang dari komunitas internasional. Jaringan *Transnational Advocacy Networks* telah berhasil mengumpulkan data-data pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina berdasarkan bukti dan fakta dilapangan karena bersentuhan langsung dengan para korban. Hal tersebut menjadi dasar kuat bagi Investigate PH untuk mendorong lembaga PBB, ICC, dan masyarakat sipil

internasional menentang pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina dan bisa menggunakan mekanisme internasional untuk mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban.

Pada tahun 2021 hakim *International Criminal Court* (ICC) telah menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden Duterte dalam perang melawan narkoba. Hakim ICC menyatakan bahwa perang melawan narkoba yang dilakukan Presiden Duterte merupakan serangan sistematis kepada warga sipil dan tidak bisa dilihat sebagai operasi penegakan hukum (Christiyaningsih, 2021). ICC berencana menyelidiki pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh tim operasi *war on drugs*, tetapi hal tersebut ditolak oleh Presiden Duterte. Menurut Duterte, ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina karena negara Filipina pada 2018 lalu telah keluar dari Statuta Roma dan penarikan tersebut mulai berlaku pada 17 Maret 2019 (DW, 2021).

BAB 3

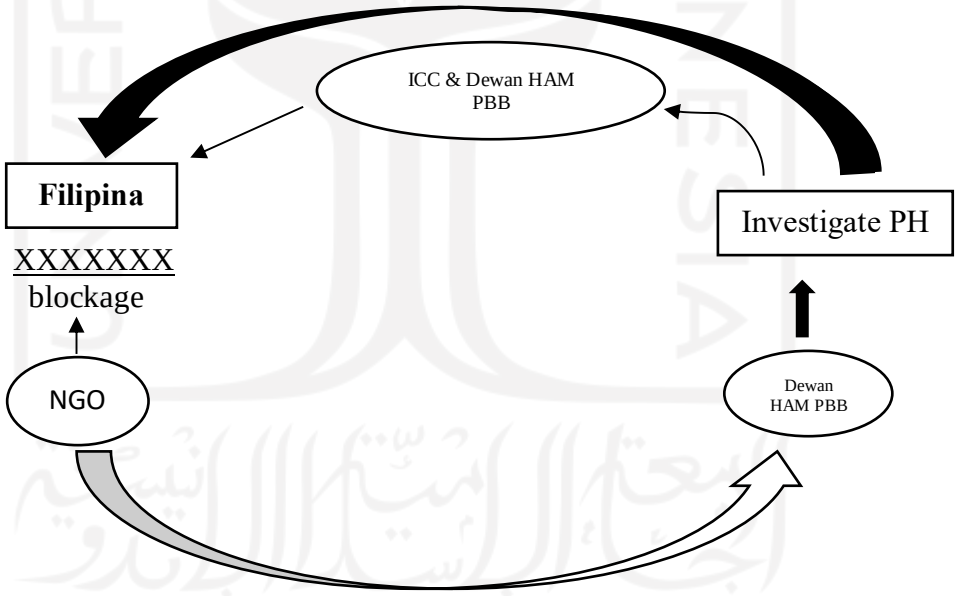
UPAYA TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM DI FILIPINA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan analisis mengenai upaya jaringan *Transnational Advocacy Networks* dalam menangani permasalahan HAM di Filipina akibat dari diberlakukannya kebijakan *War on Drugs* oleh Presiden Rodrigo Duterte. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN's) oleh Keck and Sikkink sebagai pisau analisis. Menurut Keck and Sikkink *Boomerang Pattern* merupakan ciri khas dari *Transnational Advocacy Network* (TAN's) karena tujuan dari pembentukannya yaitu untuk merubah dan mempengaruhi perilaku negara, pada umumnya bisa dilihat pada isu-isu sosial dan hak asasi manusia. *Boomerang Pattern* biasanya terjadi ketika pemerintah membatasi atau memblokir hubungannya dengan masyarakat, masyarakat akan mencari aliansi dengan membentuk jaringan advokasi untuk

mempengaruhi pemerintah. Jika jaringan advokasi lokal masih dibatasi maka mereka akan mencari akses jaringan internasional sehingga membentuk *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) (Sikkink, Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction, 2014).

Jaringan advokasi tersebut akan menekan pemerintah yang melanggar dengan bantuan sekutunya dan organisasi pihak ketiga. Di sini terlihat bahwa pola transnasional sangat berperan penting ketika pemerintah yang melanggar norma membatasi hubungannya dengan masyarakat dan jaringan domestik (Stanati Netipatalachoochote, 2018).

Gambar 2.2. *Boomerang Pattern* Dalam Permasalahan HAM di Filipina



Sumber : (Sikkink, 1999)

Berdasarkan ilustrasi diatas bahwa pemerintah Filipina melakukan *blockage* terhadap NGO lokal Filipina yaitu *Karapatan Alliance Philippines*, *National Union*

of People's Lawyers (NUPL), Ecumenical Voice for Human, Rights and Peace in the Philippines, dan *Civicus World Alliance for Citizen Participation* yang melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Presiden Duterte memperbolehkan aparat kepolisian nasional Filipina untuk menembak orang-orang yang terlibat dalam aktivisme melawan kebijakan *War on Drugs.* Hal tersebut berdampak terhadap aktivis HAM Filipina, mereka sering mendapatkan kekerasan, intimidasi, pelecehan, bahkan ditembak mati oleh aparat ketika memperjuangkan HAM. Setelah pemerintah Filipina melakukan tindakan *blockage* terhadap NGO lokal, NGO tersebut mencari aliansi mencari akses jaringan internasional sehingga membentuk *Transnational Advocacy Networks.*

Keck and Sikkink menjelaskan bahwa dalam *boomerang pattern* terdapat empat strategi yang bisa dilakukan dalam *Transnational Advocacy Networks* (TAN's), yaitu; *information politics, symbolic politics, leverage politics,* dan *accountability politics.* Strategi tersebut juga digunakan oleh *Transnational Advocacy Networks* dalam menangani permasalahan HAM di Filipina.

3.1. Information Politics

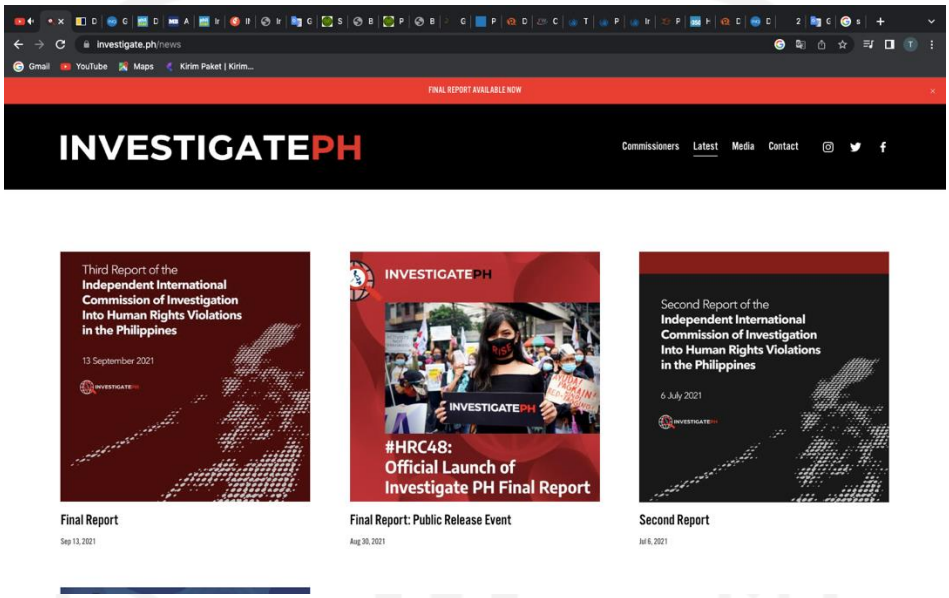
Strategi *information politics* merupakan kemampuan *Transnational Advocacy Networks* (TAN's) untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan kredibel. Menurut Keck dan Sikkink, kemampuan untuk menghasilkan informasi secara efisien dan efektif merupakan "*the most valuable trading currency*" pada jaringan advokasi transnasional (Sikkink, 1999, hal. 95). Informasi yang akurat dan

kredibel merupakan elemen penting dalam TAN meskipun sulit didapatkan. Selain kemampuan mendapatkan informasi, strategi ini juga menekankan pada kemampuan jaringan untuk menyebarkan informasi dengan cepat yang dapat digunakan secara politik dan kredibel ke tempat yang memiliki pengaruh paling berdampak. Salah satu kunci dari strategi *information politics* adalah menyusun laporan komprehensif dan mudah dipahami. (Sikkink, 1999, hal. 96).

Strategi *information politics* merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh jaringan TAN dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, pada awal kinerjanya jaringan *Transnational Advocacy Networks* melakukan survei dan pemeriksaan pada 49 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kurun waktu 2020 dan 2021. Kemudian melakukan wawancara secara langsung terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Filipina melalui telepon dan video online. Tim Hukum jaringan *Transnational Advocacy Networks* mengumpulkan dan memvalidasi bukti data yang sudah ada saat ini. Tim hukum juga meninjau dokumen laporan pelanggaran HAM dan catatan pengadilan. Selain itu, anggota komisi Investigate PH melaksanakan rapat pleno dengar pendapat, beberapa perwakilan korban dan saksi diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan (Investigate PH, 2021).

Dalam aktivitas strategi *information politics*, Investigate PH memberikan informasi yang *up to date* kepada publik hasil investigasinya. Berikut adalah contoh aktivitas *information politics* yang dilakukan oleh Investigate PH melalui web resminya.

Gambar 3.3. Laman Website Investigate PH



Sumber : (Investigate PH, 2020)

Dilaman website resmi nya terlihat Investigate PH memberikan informasi hasil laporan investigasi pelanggaran HAM di Filipina. Selain memberikan informasi hasil investigasi, Investigate PH juga memberikan ruang kepada masyarakat seluruh dunia untuk menjadi bagian investigasi Investigate PH. Mereka membuka donasi yang hasilnya untuk membiayai kegiatan investigasi. Selain berdonasi, masyarakat juga bisa menjadi partisipan atau volunteer yang bisa membantu investigasi. Tugas dari volunteer yaitu untuk membantu Investigate PH dalam penulisan, penelitian, *translator*, desainer, dan pengelola website. Kemudian jika

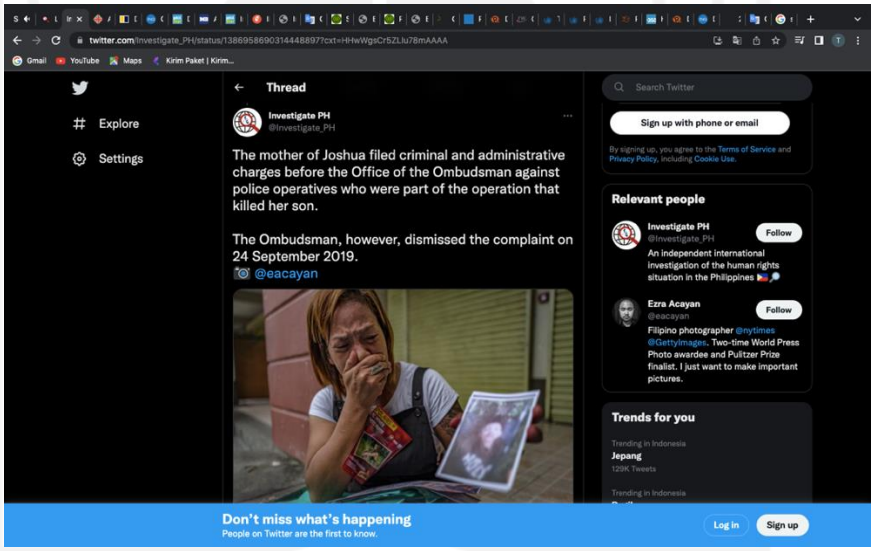
sebagai partisipan, mereka bisa memilih menjadi bagian dari sub-komisi yang terlibat langsung dalam investigasi atau menjadi *endorser* baik secara organisasi maupun individu dengan tugas mendukung dan mempromosikan jaringan *Transnational Advocacy* kepada masyarakat secara luas (Investigate PH, 2020).

Jaringan TAN juga menggunakan media sosial twitter untuk memobilisasi masa agar mendapatkan simpati dan dukungan terhadap isu pelanggaran HAM di Filipina. Penggunaan media sosial ini dinilai sejalan dengan perkembangan teknologi di era modern saat ini. Dalam teori media sebagai *agenda-setting* dijelaskan bahwa paparan informasi yang dilakukan terus menerus kemudian informasi yang diterima baik melalui media tradisional dan media baru diterima oleh informan dan mendapatkan perhatian lebih oleh media, maka informasi atau isu tersebut akan menjadi isu yang lebih diperbincangkan, didiskusikan dan diperdebatkan (McQuail, 2011).

Dengan memberikan informasi yang dilakukan berulang-ulang atau *exposure of information* melalui media sosial diharapkan dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah Filipina. Hal ini berarti bahwa aktivitas *information politics* yang dilakukan oleh jaringan TAN merupakan langkah awal yang tepat untuk memulai membangun jaringan karena paparan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun simpati dari dunia internasional terkait isu pelanggaran HAM di Filipina. Keck dan Sikkink sendiri membagi penggunaan media sosial menjadi dua bagian yaitu sebagai sarana penyebaran informasi berupa data dan fakta dan juga sebagai bentuk cerita dan testimoni. Dalam hal ini jaringan

TAN tidak memisahkan fungsi penyajian data dan penggambaran cerita dan testimoni dalam media sosial tertentu, tetapi dalam prakteknya Investigate PH cenderung menggunakan website resminya sebagai media untuk memberikan informasi berupa data dan fakta, sedangkan fungsi cerita dan testimoni lebih banyak dilakukan melalui media sosial twitter. Informasi berupa cerita dan testimoni digunakan untuk menggambarkan penderitaan korban pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian dalam operasi *War on Drugs* seperti gambar berikut ini.

Gambar 3.4. Laman twitter Investigate PH



Sumber : (@InvestigatePH, 2021)

Dalam gambar tersebut memperlihatkan seorang ibu dari korban pelanggaran HAM mengajukan tuntutan pidana dan administrasi ke Kantor Ombudsman terhadap petugas polisi yang merupakan bagian dari operasi yang membunuh putranya. Namun, Ombudsman menolak pengaduan tersebut pada 24 September

2019. Dengan memberikan informasi melalui media sosial twitter, Investigate PH akhirnya banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik individu, organisasi, dan media. Beberapa media global yang akhirnya memiliki perhatian terhadap isu hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan sama didepan hukum seperti Philstar, Mindanews, GMA News, Canada Filles, Asian Journal, dan The Diplomat (Investigate PH, 2020). Media-media global ini secara teratur merujuk pembacanya untuk memberikan dukungan terhadap Investigate PH. Selain itu, Investigate PH mengadakan event-event secara daring seperti conference, Investigate PH Hosts Inaugural Media Event, Asian Pacific Debut, INVESTIGATE PH - North America & Europe Debut, yang membahas tentang peluncuran Investigate PH, isu-isu HAM dan situasi HAM di FIlipina (Investigate PH, 2020).

Strategi *information politics* menjadi kekuatan utama jaringan TAN dalam penyelidikan pelanggaran HAM di Filipina. Dengan keahlian anggota Investigate PH dalam menggali informasi dan menyajikan laporan hasil investigasi kepada publik, Investigate PH akhirnya mendapat dukungan dari berbagai pihak dengan membantu jaringan TAN dalam penyelidikan. Selain itu, dengan informasi yang diberikan jaringan TAN, pada tahun 2021 hakim *International Criminal Court* (ICC) akhirnya menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden Duterte dalam perang melawan narkoba. Hakim ICC menyatakan bahwa perang melawan narkoba yang dilakukan Presiden Duterte merupakan serangan sistematis kepada warga sipil dan tidak bisa dilihat sebagai operasi penegakan hukum (Christiyaningsih, 2021).

3.2. Symbolic Politics

Strategi politik simbol kemampuan untuk menarasikan dan menyampaikan informasi situasi yang sedang dialami kepada masyarakat dengan simbol-simbol politik. Strategi ini merupakan bagian dari proses persuasi, yang dengan adanya proses ini menciptakan kesadaran dan perluasan simbol konsituen mereka (Sikkink, 1999, hal. 96). Sejak awal kemunculannya, Investigate PH menggunakan strategi politik simbol dengan gerakan tagar *#Stopkillings* dan *#InvestigatePH* melalui twitter resminya untuk menarik perhatian masyarakat luas agar peduli terhadap situasi hak asasi manusia di Filipina.

Tagar telah mendorong kesadaran orang-orang atas situasi HAM di Filipina dan keluarga korban memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan atas kehilangan keluarganya. Mereka menjadi berani menceritakan tentang keluarga atau kerabatnya yang telah meninggal akibat dibunuh oleh aparat yang melakukan operasi *War on Drugs*. Seperti Analyn Giganto bersaksi tentang pembunuhan terhadap suaminya yang merupakan tokoh Masyarakat Adat di provinsi Panay di Filipina, termasuk di antara 9 Masyarakat Adat yang terbunuh dalam operasi polisi dan militer serentak di provinsi Batangas, Cavite, Laguna dan Rizal di sekitar Manila pada 30 Desember 2020. Setelah mendapat cerita dari Analyn Giganto, Investigate PH memunculkan tagar *#JusticeForTumandokMassacre #InvestigatePH #StopTheKillings* sebagai aksi solidaritas atas kematian yang dialami keluarganya. Selain kesaksian Analyn Giganto, ada juga kesaksian dari Lean Porquia yang ayahnya terbunuh pada tahun 2020, 14 peluru masuk ke tubuhnya. Sebelum dibunuh, ayahnya merupakan koordinator dapur komunitas

untuk membantu orang-orang bertahan dari *lockdown* akibat dari pandemi di Filipina. Sebagai aksi solidaritas, Investigate PH membuat tagar *#InvestigatePH #JusticeForJoryPorquia #StopTheKillings* di twitter resminya. Aksi tersebut dilakukan agar keluarga korban yang mengalami pembunuhan oleh aparat bisa memberikan kesaksiannya kepada Investigate PH yang nantinya menjadi bahan laporan investigasi (@Investigate PH, 2020).

Selain aksi tagar, jaringan TAN juga merilis video melalui akun twitternya yang memperlihatkan orang-orang yang mendukung investigasi Investigate PH atas pelanggaran HAM di Filipina. Video tersebut merupakan dokumentasi aksi-aksi protes masyarakat Filipina terhadap Presiden Duterte yang telah melakukan pembunuhan di luar hukum. Dari video tersebut memberikan pandangan tentang pelanggaran HAM di Filipina dan Investigate PH sehingga banyak orang di twitter memberikan dukungan terhadap investigasi yang dilakukan Investigate PH. Dukungan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu me-*retweet* video yang diunggah Investigate PH di akun twitter pribadi mereka, mempromosikan HAM di Filipina, bahkan ikut terlibat secara langsung dalam investigasi. Hal tersebut tersebut membuktikan bahwa banyak orang yang peduli terhadap HAM di Filipina (@InvestigatePH, 2021).

3.3. Leverage Politics

Leverage Politics merupakan kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari aktor yang memiliki pengaruh lebih besar yang dapat memperkuat jaringan transnasional yang lebih kecil pengaruhnya. Dalam menjalankan *Leverage*

Politics, TAN's melibatkan 'aktor target' yang mungkin pemerintah, tetapi mungkin juga lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, atau aktor swasta seperti perusahaan transnasional. Hal tersebut dilakukan karena kemampuan *Transnational Advocacy Networks* (TAN'S) tidak seperti aktor negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer, sehingga membutuhkan aktor yang lebih kuat untuk membantu kekuatan TAN (Sikkink, 1999, hal. 97). Tujuan dari efektivitas politik dalam jaringan TAN seringkali melibatkan perubahan kebijakan oleh aktor target, sehingga untuk mencapai perubahan kebijakan tersebut, jaringan TAN memerlukan bantuan dari aktor yang lebih kuat untuk membujuk dan memberikan tekanan (Sikkink, 1999, hal. 97).

Strategi *Leverage Politics* terbagi menjadi 2 yaitu moral dan material. Pengaruh moral sering disebut dengan *mobilization of shame* atau upaya advokasi untuk menjadikan perilaku aktor target sebagai pusat perhatian internasional. Sedangkan, pengaruh material merupakan bantuan advokasi yang melibatkan uang atau barang (namun termasuk suara di organisasi internasional, jabatan bergengsi, atau keuntungan lainnya) (Sikkink, 1999, hal. 97).

Strategi *Leverage Politics* yang dilakukan Investigate PH ditargetkan untuk organisasi internasional seperti PBB dan ICC yang memiliki peran terhadap HAM dan individu yang memiliki pengaruh di dunia internasional. PBB dan ICC diharapkan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan HAM menggunakan mekanisme internasional. Kemudian, individu yang menjadi target *Leverage Politics* Investigate PH diharapkan dapat membantu proses investigasi

atau menjadi *endorser* dengan tugas mendukung dan mempromosikan Investigate PH kepada masyarakat secara luas (Investigate PH, 2020).

Melalui *Leverage Politics* jaringan TAN berhasil menarik perhatian organisasi internasional seperti ICC. Fatou Bensouda, seorang mantan jaksa ICC mengajukan permintaan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan HAM di Filipina. Menurut Bensouda, actor pemerintah terutama anggota keamanan Filipina telah membunuh ribuan tersangka pengguna narkoba dan warga sipil selama operasi kebijakan *War on Drugs*. Secara resmi pada 15 September 2021 ICC membuka penyelidikan terhadap kejahatan HAM tersebut. Perintah penyelidikan juga telah ditandatangani oleh Hakim Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, Maria del Socorro Flores Liera dan Peter Kovacs. Dalam hal ini Investigate PH berhasil mendapat *material leverage* dari ICC yang telah membuka penyelidikan resmi terhadap kejahatan HAM di Filipina (Berty, 2021).

Pada tahun 2021 hakim *International Criminal Court* (ICC) telah menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden Duterte dalam perang melawan narkoba. Hakim ICC menyatakan bahwa perang melawan narkoba yang dilakukan Presiden Duterte merupakan serangan sistematis kepada warga sipil dan tidak bisa dilihat sebagai operasi penegakan hukum (Christiyaningsih, 2021). ICC berencana menyelidiki pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh tim operasi *war on drugs*, tetapi hal tersebut ditolak oleh Presiden Duterte. Menurut Duterte, ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina karena negara Filipina pada 2018

lalu telah keluar dari Statuta Roma dan penarikan tersebut mulai berlaku pada 17 Maret 2019 (DW, 2021).

Selain mendapat *material support*, Investigate PH juga mendapat *moral support* dari beberapa organisasi dan individu. Beberapa organisasi nasional Filipina dan internasional ikut mendukung Investigate PH, seperti; Aksi Solidaritas Tiers Monde (ASTM), Solidaritas Filipina Belanda, Organisasi Solidaritas Kanada-Filipina – Toronto, Komite Hak Asasi Manusia Ontario di Filipina, Kairos BC-Yukon, Inisiatif Beaconsfield, Serikat Pekerja Publik Kanada, Institut Kebijakan Luar Negeri Kanada, *Partera Peacebuilders International*, KAIROS*: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, National Union of Public and General Employees,* Aliansi Keadilan Pertambangan, Gereja Anglikan Kanada, Aliansi Layanan Publik Kanada, Gereja Persatuan Kanada. Organisasi-organisasi tersebut terlibat dalam menyebarluaskan pelanggaran HAM pemerintah Filipina dan mengecam perbuatan yang sudah dilakukan aparat kepolisian yang sudah banyak membunuh masyarakat sipil (Investigate PH, 2020).

Individu yang terlibat dalam Investigate PH, diantaranya; Hannah Neumann, Dr. Bernd Basting, Dagmar Eberhard, Mike Forschner, Julia Schatten, Dr. Bernard Hoeper, Dr. Rainer WerningJörg Schwieger, Prof. Dr.-ing Prof. h.c. Josef Lutz, Lutz Drescher, Prof. Dr. Mohssen Massarrat, Clemens Jürgenmeyer. Keterlibatan mereka merupakan bentuk dukungan atas investigasi HAM di Filipina dan hal tersebut membuktikan bahwa strategi *Leverage Politics* yang dilakukan Investigate PH berhasil untuk mendapat dukungan atas investigasi pelanggaran HAM dari

orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia internasional (Investigate PH, 2020).

Tabel 3. 1 Strategi *Laverage Politics* jaringan TAN

NO	*Leverage Politics*	Ada	Tidak Ada	Bantuan di Dapat
1.	Material	V		Pada tahun 2021 hakim *International Criminal Court* (ICC) telah menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM
2.	Moral	V		1. Dukungan dari organisasi seperti: *artera Peacebuilders International,* Aliansi Keadilan Pertambangan, Gereja Anglikan Kanada, Aliansi Layanan Publik Kanada, Gereja Persatuan Kanada. 2. Dukungan individu seperti: Hannah Neumann, Dr. Bernd Basting, Dagmar Eberhard, Mike Forschner, Julia Schatten, Dr. Bernard Hoeper,

				Dr. Rainer WerningJörg Schwieger

3.4. Accountability Politics

Accountability Politics merupakan upaya untuk mengendalikan aktor yang memiliki pengaruh lebih besar agar berpihak pada prinsip yang sudah disepakati dalam jaringan advokasi (Sikkink, 1999, hal. 95). Politik Akuntabilitas ketika menjadi taktik yang dapat digunakan jaringan aktor target yakni pemerintah telah memberikan komitmen untuk mengubah perilaku negara atas isu yang di advokasikan (Sikkink, 1999, hal. 97). Dengan hal itu, jaringan memiliki peluang politik akuntabilitas yakni dapat mendapatkan posisi untuk mengamati antara wacana dan praktik dari komitmen tersebut sebagai komando informasi mereka (Sikkink, 1999, hal. 98). Taktik ini bertujuan agar implementasi dari perubahan hukum sesuai dengan komitmen, dimana seringkali pemerintah membuat komitmen perubahan hanya untuk fokus pada jaringan dan perhatian publik (Sikkink, 1999, hal. 97). Jaringan akan berupaya mengawasi komitmen tersebut untuk mencegah penyimpangan aktor target (Sikkink, 1999, hal. 97)

Dalam hal ini jaringan TAN belum berhasil untuk mencapai *Accountability Politics.* Kegagalan strategi *Accountability Politics* yang dilakukan Investigate PH karena adanya *blockage* dari pemerintah. Sejak awal diluncurkannya kebijakan *War on Drugs*, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mencoba menghalangi operasi kebijakan *War on Drugs*. Pada 16 Agustus

2016, Presiden Duterte menginstruksikan aparat kepolisian untuk menembak mati aktivis HAM jika menghalangi aparat yang sedang melakukan operasi kebijakan *War on Drugs*. Selain itu, dalam konferensi pers setelah pidato kenegaraannya pada 24 Juli 2017 Duterte secara terbuka mengecam dan akan memblokir Komisi HAM Filipina jika melakukan penyelidikan terhadap pasukan keamanan Filipina atas dugaan pelanggaran HAM (Human Right Watch, 2017).

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Duterte juga berdampak pada investigasi yang dilakukan oleh jaringan TAN. Setelah jaringan TAN meluncurkan laporan pada Maret 2021, Sekretaris Presiden Filipina Martin Andanar menyatakan bahwa Investigate PH merupakan agenda politik dari oposisi yang ingin menjatuhkan pemerintahan Duterte. Menurut Andanar, laporan yang dibuat Investigate PH tentang situasi HAM di Filipina harus ditolak karena tidak mewakili lembaga global atau regional yang kredibel. Andanar juga memperingatkan publik agar tidak percaya pada laporan Investigate PH karena dianggap tidak kredibel. Andanar juga meminta Investigate PH untuk menghentikan "*smear campaign*" atau kampanye hitam setelah meluncurkan laporan kejahatan HAM di Filipina. Dia mengatakan Investigate PH sudah ikut campur dalam politik dalam negeri Filipina menjelang pemilu tahun 2022 (Kabiling, 2021).

3.5. Tingkat Keberhasilan jaringan TAN Dalam Menangani Permasalahan HAM di Filipina

Menurut Keck dan Sikkink untuk menilai pengaruh jaringan advokasi harus melihat pencapaian tujuan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Keck dan

Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh jaringan yaitu :(1) penciptaan isu dan pengaturan perhatian/agenda; (2) pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional; (3) pengaruh terhadap prosedur kelembagaan; (4) pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'aktor sasaran' yang mungkin negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta seperti perusahaan Nestle; (5) pengaruh terhadap perilaku negara (Sikkink, 1999).

Tingkat keberhasilan jaringan TAN dalam menangain permasalahan HAM di Filipina hanya mencapai pada pengaruh terhadap prosedur kelembagaan internasional yaitu ICC. *International Criminal Court* (ICC) pada september 2021 telah menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden Duterte dalam perang melawan narkoba. Pembatasan pemerintah Filipina terhadap pihak eksternal menyulitkan Investigate PH untuk merubah kebijakan *War on Drugs* bebas dari pelanggaran HAM.

BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

Filipina merupakan negara dengan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang cukup tinggi. Sebelum diangkatnya presiden Rodrigo Duterte, kasus narkoba di Filipina selalu mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Pada awal pemerintahannya Duterte membuat kebijakan "*War on Drugs*" untuk memerangi para pengedar narkoba di Filipina. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberantas kejahatan narkoba dan menghilangkan *narco-politics* di Filipina. Dalam menjalankan kebijakan *War on Drugs*, Duterte memerintahkan polisi Filipina untuk melakukan operasi *Double Barrel* menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Project Tokhang dan Project HVT.

Dalam menjalankan operasi kebijakan *War on Drugs*, pemerintah Filipina telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip HAM yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. Seperti dari definisi *Universal Declaration of Human*

Right PBB 1984, kebijakan *War on Drugs* presiden Duterte telah melanggar hak hidup dan diadili yang dimiliki setiap manusia. Dalam *Universal Declaration of Human Right* PBB dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki asas praduga tak bersalah dimana seharusnya para pelaku harus diadili terlebih dahulu oleh penegak hukum Filipina sebelum dijatuhi hukuman mati.

Dengan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina Dewan HAM PBB pada tahun 2020 memberikan kerjasama teknis dan pembangunan kapasitas untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Filipina. Akan tetapi Dewan HAM PBB tidak mampu meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Filipina menggunakan mekanisme internasional meskipun sudah terbukti terdapat pelanggaran HAM.

kemunculan Investigate PH merupakan respon masyarakat sipil internasional terhadap ketidakmampuan Dewan HAM PBB dalam menanggulangi pelanggaran HAM selama operasi *War on Drugs* di Filipina, dimana Dewan HAM PBB hanya memberikan bantuan teknis yang tidak tepat sasaran. Meskipun Investigate PH memiliki peran dalam menangani permasalahan HAM di Filipina, Investigate PH bukan sebagai *boomerang pattern* yang utama tetapi sebagai bentuk perpanjangan tangan dari kebutuhan *Transnational Advocacy Networks* (TAN's).

Untuk dapat menganalisis upaya investigasi Investigate PH terhadap pelanggaran HAM di Filipina dapat diidentifikasi melalui strategi yang dikemukakan Keck & Sikkink, yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics,* dan *accountability politics*. Dalam pelaksanaannya, telah menjalankan beberapa strategi diatas. Namun dengan adanya *blockage* dari

pemerintah Filipina, Investigate PH belum berhasil membuat pemerintah Filipina berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan domestiknya mengenai kebijakan *War on Drugs*.

Selain itu adanya pembatasan pemerintah Filipina terhadap pihak eksternal menyulitkan Investigate PH untuk merubah kebijakan *War on Drugs* bebas dari pelanggaran HAM. Sehingga tingkat keberhasilan Investigate PH dalam menangain permasalahan HAM di Filipina hanya mencapai pada pengaruh terhadap prosedur kelembagaan internasional yaitu ICC.

Rekomendasi

Penelitian ini telah menjelaskan upaya jaringan TAN dalam menangani permasalahan HAM di Filipina. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Penulis memberikan rekomendasi agar penelitian selanjutnya membahas mengenai upaya PBB dalam menangani permasalahan HAM di Filipina menggunakan mekanisme internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan Nasional dalam Konteks. *Jurnal Keamanan Nasional*.

Arugay, A. A. (2016). *The Philippines in 2016: The Electoral Earthquake and its Aftershocks.* (D. Singh, Penyunt.) ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Anheiher, H. G. (2001). *Global Civil Society*. United States: Oxford University Press.

ALJIBE, T. (2018, 09 16). *Philippines Events of 2018*. Dipetik 09 25, 2022, dari Human Right Watch: https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/philippines

AL JAZEERA. (2018, februari 24). *Thousands protest deadly drug war in the Philippines*. Dipetik oktober 5, 2022, dari https://www.aljazeera.com/news/2018/2/24/thousands-protest-deadly-drug-war-in-the-philippines

Berty, T. T. (2021, September 16). *Pengadilan Internasional Izinkan Penyelidikan Pelanggaran HAM Presiden Rodrigo Duterte*. Dipetik November 23, 2022, dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/global/read/4659702/pengadilan-

internasional-izinkan-penyelidikan-pelanggaran-ham-presiden-rodrigo-duterte

Baswedan, L. R. (2017). Kebijakan War On Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Bautista, L. B. (2017). *Duterte and his quixotic war on drugs.* University of Wollongong, FACULTY OF LAW, HUMANITIES AND THE ARTS - PAPERS. Faculty of Law, Humanities and the Arts.

Batiwala, B. a. (2006). *Why Transnational Civil Society Matters.* CT: Kumarian Press.

Caliwan, C. L. (2020, Desember 15). *'Real Numbers' on PH anti-drug campaign accurate: PDEA*. Dipetik Oktober 6, 2022, dari The Philippine News Agency : https://www.pna.gov.ph/articles/1124814

Christensen. (2006). International Nongovernmental Organizations: Globalization, Policy Learning, and the Nation-State. *International Journal of Public Administration*, 281-303.

Auld, G. B. (2009). *The Emergence of Non-State Market-Driven (NSMD) Global Environmental Governance: A Cross-Sectoral Assessment.* New York: Cambridge University Press.

Davies. (2014). *NGOs: A New History of Transnational Civil Society*. New York: Oxford University Press.

DW. (2021, juni 15). *Duterte Tolak Bekerja Sama dalam Penyelidikan ICC*. Dipetik oktober 20, 2022, dari DW: https://www.dw.com/id/duterte-tolak-bekerja-sama-dalam-penyelidikan-icc/a-57894527

Dangerous Drugs Board. (2020, 10 14). *2019 Drug Survey shows drug use prevalence rate falls to 2.05%*. Diambil kembali dari https://www.ddb.gov.ph/newsroom/511-2019-drug-survey-shows-drug-use-prevalence-rate-falls-to-2-05

Nn. (2013). *The Philippine Drug Situation.* Dipetik 09 2022, 27, dari PDEA Annual Report: https://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf

United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law. (2010). *International Narcotics Control Strategy Report.* United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law, State

Bureau for International Narcotics and Law. United State: United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law.

R.C.Marquez. (2015). *Philippine National Police 2015 Annual Report.* Philippine : Philippine National Police.

Wells. (2017). *The Human Rights Consequences of the War on Drugs in the Philippines.* London: Amnesty Internasional.

Reyes, D. A. (2016, 12 1). The Spectacle of Violence in Duterte's “War on Drugs”. *SAGE Journals Home, 35*(3).

Nn. (2020). *WHY INVESTIGATE PH?* Dipetik 09 25, 2022, dari INVESTIGATE PH: https://www.investigate.ph/

Navallo, M. (17, 12 2020). *Independent int'l probe on alleged human rights violations in PH launched*. Dipetik 09 25, 2022, dari ABS-CBN News: https://news.abs-cbn.com/news/12/17/20/independent-intl-probe-on-ph-human-rights-violations-launched?fbclid=IwAR1EhxF-9t6UxDiKzTzHOQyEutftWhfhRFdE8s9zuVTYem78S_W2JJGzlKo

Stanati Netipatalachoochote, A. C. (2018, June). Stanati Netipatalachoochote, Aurelia Colombi Ciacchi, Ronald Holzhacker. *Journal of Southeast Asian Human Rights, 2*(1).

RETNOWATI, C. (2018). UPAYA HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DI FILIPINA. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Thompson, M. R. (2016, December 1). The Early Duterte Presidency in the Philippines. *SAGE Journals Home, 35*(3).

Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer.* Jakarta: Salemba Humanika.

Republika. (2016, 08 24). *Isu Keamanan Berhasil Tingkatkan Popularitas Duterte*. Dipetik 09 28, 2022, dari Republika.

The Guardian. (2016, Juli 1). *Philippines President Rodrigo Duterte Urges People to Kill Drug Addicts*. Dipetik september 28, 2022, dari The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/01/philippines-president-rodrigo-duterte-urges-people-to-killdrug-addicts

Gavilan, J. (2016, september 19). *DDB: Philippines has 1.8 million current drug users*. Dipetik September 25, 2022, dari Rappler: https://www.rappler.com/nation/146654-drug-use-survey-results-dangerous-drugs-board-philippines-2015/

Utari, G. M. (2021). PERANG TERHADAP NARKOBA SERTA PENARIKAN DIRI DARI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL OLEH FILIPINA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Kertha Negara, 9*(3), 165.

Dangerous Drugs Board . (2007). *SUBJECT: PROVIDING FOR REVISED GUIDELINES IN THE CONDUCT*. Dipetik Oktober 01, 2022, dari The Dangerous Drugs Board : https://www.ddb.gov.ph/images/Board_Regulation/2007/Bd.%20Reg.%202%2007.pdf

Philippines National Police. (2016, July 01). *PNP ANTI-ILLEGAL DRUGS CAMPAIGN PLAN-PROJECT: "DOUBLE BARREL"* . Dipetik Oktober 2022, 01, dari NATIONAL POLICE COMMISSION NATIONAL HEADQUARTERS PHILIPPINE NATIONAL POLICE OFFICE OF THE CHIEF, PNP : https://didm.pnp.gov.ph/images/Command%20Memorandum%20Circulars/CMC%202016-16%20PNP%20ANTI-ILLEGAL%20DRUGS%20CAMPAIGN%20PLAN%20%20PROJECT%20DOUBLE%20BARREL.pdf

Salaverria, L. (2017, March 02). *Duterte: Criminals have no humanity*. Dipetik Oktober 02, 2022, dari Philippine Daily Inquirer : https://newsinfo.inquirer.net/876970/duterte-criminals-have-no-humanity

Philippines National Police. (2016). *Annual Report 2016*. Dipetik Oktober 01, 2022, dari Philippines National Police: https://pnp.gov.ph/wp-content/uploads/2021/05/AR2016.pdf

Sianturi, G. M. (2021). Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Negara*, *9*, 164-74.

Kompas. (2017, April 25). *Duterte Diadukan ke Mahkamah Kriminal Internasional*. Dipetik 10 01, 2022, dari Kompas: https://internasional.kompas.com/read/2017/04/25/19054101/duterte.diadukan.ke.mahkamah.kriminal.internasional?page=1

United Nation. (1948, Desember 10). *Universal Declaration of Human Rights* . Dipetik Oktober 02, 2022, dari https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf

Idrus, P. G. (2021, September 13). *Laporan: Duterte terlibat pelanggaran HAM di Filipina*. Dipetik Oktober 02, 2020, dari https://www.aa.com.tr/id/dunia/laporan-duterte-terlibat-pelanggaran-ham-di-filipina/2363346

Amnesty International. (2017, Januari 31). *"If You Are Poor, You Are Killed" Extrajudicial Executions In The Philippines' "War On Drugs".* Dipetik Oktober 03, 2022, dari Amnesti International: https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/04/philippines_ejk_report_v19_final_0.pdf

Financial Times. (2020, Juni 4). *UN condemns Philippines for Duterte's drugs war*. Dipetik Oktober 02, 2022, dari Financial Times: https://www.ft.com/content/75a334cb-e346-4236-b102-3f52f46456f4

University of Minnesota. (2014). *Ratification of International Human Rights Treaties - Philippines.* Dipetik Oktober 03, 2022, dari Human Rights Library: http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-philippines.html

The Office of the Prosecutor. (2020, Desember 14). *Report on Preliminary Examination Activities 2020*. Dipetik Oktober 7, 2022, dari International Criminal Court: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf

GOZUM, I. (2020, desember 21). *Rage and fury over cop's killing of mother and son: 'No license to kill'*. Dipetik oktober 5, 2022, dari rappler: https://www.rappler.com/nation/netizens-reaction-tarlac-cop-killing-december-2020/

Human Rights Council. (2020, juni 29). *Situation of human rights in the Philippines.* Dipetik oktober 5, 2022, dari Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf

United Nation. (2020, juni 4). *Philippines: UN report details widespread human rights violations and persistent impunity.* Dipetik oktober 5, 2022, dari https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/philippines-un-report-details-widespread-human-rights-violations-and

Investigate PH. (2020, Desember). *Endorser*. Dipetik oktober 07, 2022, dari Investigate PH: https://www.investigate.ph/endorsers

Investigate PH. (2021, Maret 15). *Initial Report of the Independent International Commission of Investigation Into Human Rights Violations in the Philippines.* Dipetik oktober 7, 2022, dari Investigate PH: https://drive.google.com/file/d/1vjt_g_HeqatRnIXmv0nlt0eptkse31of/view

Investigate PH. (2020). *WHAT IS INVESTIGATE PH?* Dipetik oktober 7, 2022, dari Investigate PH: https://www.investigate.ph/

Luna, F. (2021, juli 6). *Investigate PH: 'Tokhang' template seen in killings of Filipino activists*. Dipetik oktober 28, 2022, dari Philstar: https://www.philstar.com/headlines/2021/07/06/2110571/investigate-ph-tokhang-template-seen-killings-filipino-activists

Sikkink, M. E. (1999). Transnational Advocacy Networks in International Politics. *International social science journal, 159*(ISSJ).

Christiyaningsih. (2021, september 16). *ICC Setujui Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Duterte*. Dipetik oktober 20, 2022, dari Republika: https://www.republika.co.id/berita/qzip3034627326/icc-setujui-penyelidikan-dugaan-pelanggaran-ham-duterte

Investigate PH. (2020). *Media Coverage*. Dipetik oktober 18, 2022, dari Investigate PH: https://www.investigate.ph/media-coverage

Investigate PH. (2021, juli 06). *Second Report of the Independent International Commission of Investigation Into Human Rights Violations in the Philippines.* Dipetik oktober 23, 2022, dari Investigate PH: https://drive.google.com/file/d/1PoeMcvoOAxf_-0AOKE9iSXZf7bV9YCuK/view

Investigate PH. (2021, september 13). *Third Report of the Independent International Commission of Investigation Into Human Rights Violations in the Philippines.* Dipetik oktober 24, 2022, dari Investigate PH: https://static1.squarespace.com/static/5fc77138d32fb7060d11df17/t/613e1a81dae7575282766155/1631459969508/ExecSummary+Third+Report+V04.pdf

Weist, S. d. (2005). *'The Uneven Geography of Global Civil Society: Transnational and Global Influences on Transnational Association.* Social Forces.

Salamon, L. (1994). *'The Rise of the Nonprofit Sector'.*

Balboa. (2014). *How Successful Transnational Non-governmental Organizations Set Themselves Up for Failure on the Ground.*

Charnovitz, S. (1997). 'Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance'. *Michigan Journal of International Law*, 183.

Myers, N. M. (2000). *'Biodiversity Hotspots For Conservation Priorities'.*

Cashore, B. a. (2007). 'Punctuating Which Equilibrium? Understanding Thermostatic Policy Dynamics in Pacific Northwest Forestry. *American Journal of Political Science*, 51.

Moloney, D. S. (2019). *The Oxford Handbook of : Global Policy and Transnational Administration.* United Kingdom: Oxford University Press.

Krawczyk, K. A. (2003). *International NGOs, Transnational Civil Society, and Global Public Policy: Opportunities and Obstacles in the Twenty-First Century*. Malden: Polity Publishers in association with Blackwell Publishers.

Ekoputro, I. M. (1985). Asas praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia di dalam KUHAP. *Universitas Indonesia, VI*, 116-118.

Sikkink, M. E. (2014). *Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction*. Ithaca: Cornell University Press.

Human Right Watch. (2022, September 12). *Human Rights Watch Briefing Paper Addressed to Member-states of the UN Human Rights Council Ahead of the Council's 51st Session*. Dipetik November 20, 2022, dari Human Right Watch: https://www.hrw.org/news/2022/09/12/human-rights-watch-briefing-paper-addressed-member-states-un-human-rights-council

Human Right Watch. (2017, Agustus 17). *Philippines: Duterte Threatens Human Rights Community*. Dipetik Novesmber 21, 2022, dari Human Right Watch: https://www.hrw.org/news/2017/08/18/philippines-duterte-threatens-human-rights-community

act.350.org. (2020, September 14). *Stop the killings! UN Human Rights Council, investigate the human rights situation in the Philippines!* Dipetik November 21, 2022, dari act.350.org: https://act.350.org/sign/stop-killings-philippines/?fbclid=IwAR31qwKkENcGKm5jdNT-ayFVIQljS9W74_PvZEUVNfbP4fW2E89nuXIL0TA

Human Right Watch. (2022, September 08). *Human Rights Watch Briefing Paper Addressed to Member-states of the UN Human Rights Council Ahead of the Council's 51st Session*. Dipetik November 21, 2022, dari Human Right Watch: https://www.hrw.org/news/2022/09/12/human-rights-watch-briefing-paper-addressed-member-states-un-human-rights-council

Human Right Watch. (2017, Agustus 17). *Philippines: Duterte Threatens Human Rights Community Call for Police to Shoot Activists 'Reprehensible'*. Dipetik November 21, 2022, dari Human Right Watch: https://www.hrw.org/news/2017/08/18/philippines-duterte-threatens-human-rights-community

Kabiling, G. (2021, Maret 17). *Andanar shoots down 'Investigate PH,' rejects its 'malicious' report on alleged rights abuses*. Dipetik November 22, 2022, dari Manila Bulletin: https://mb.com.ph/2021/03/17/andanar-shoots-down-investigate-ph-rejects-its-malicious-report-on-alleged-rights-abuses/

United Nation. (2022, September 13). *The Philippines: UN human rights report looks to new administration for progress on accountability and reforms*. Dipetik November 21, 2022, dari United Nation Human Right: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/philippines-un-human-rights-report-looks-new-administration-progress

OHCHR. (2020, JUni 25). *Philippines: UN human rights experts renew call for an on-the-ground independent, impartial investigation*. Dipetik November 20, 2022, dari OHCHR: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/philippines-un-human-rights-experts-renew-call-ground-independent-impartial

Patel, D. C. (2018, Februari 15). *In Examining the Philippines' Drug War, the ICC Takes a Positive but Challenging Step*. Dipetik November 18, 2022, dari CHATHAM HOUSE: https://www.chathamhouse.org/2018/02/examining-philippines-drug-war-icc-takes-positive-challenging-step

@Investigate PH. (2020, Desember). *Investigate PH*. Retrieved November 20, 2022, from An independent international investigation of the human rights situation in the Philippines: https://twitter.com/investigate_ph

@InvestigatePH. (2021, Juni 30). *The Second Report of Investigate PH launches on July 6 at 2pm Geneva Time. Register here: https://investigate.ph/SecondReport*. Dipetik November 18, 2022, dari @InvestigatePH: https://twitter.com/Investigate_PH/status/1410041754233950211?cxt=HHwWhsCq-abgvJEnAAAA

McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Masa. Jakarta.* Jakarta: Salemba Humanika.

@InvestigatePH. (2021, April 27). *The mother of Joshua filed criminal and administrative charges before the Office of the Ombudsman against police operatives who were part of the operation that killed her son*. Dipetik November 15, 2022, dari Investigate PH: https://twitter.com/Investigate_PH/status/1386958690314448897?cxt=HHwWgsCr5ZLlu78mAAAA